TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH ADVOKAT INDONESIA

Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Di Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA	**: ADIL MULIA**
NPM	**: 171021074**
BKU	**: HUKUM PIDANA**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH ADVOKAT INDONESIA

Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama	: ADIL MULIA, S.H
NPM	: 171021074
BKU	: HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal 24-04-2021

Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum

Pembimbing II Tanggal 10-05-2021

Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH ADVOKAT INDONESIA

Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru

Nama	: ADIL MULIA
NPM	: 171021074
BKU	: HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Juni 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji

ketua	Sekretaris
Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum	Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H
Anggota	Anggota
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : ADIL MULIA, S.H

NPM : 171021074

BKU : HUKUM PIDANA

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum

Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH ADVOKAT INDONESIA Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing II	Pembimbing I		
1.	18-04-2021	√		• Perbaiki Abstrak • Bab I perbaiki tentang tujuan penelitian • Bab II perbaiki Tinjauan Umum • Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran • Perbaiki footnote	
2.	20-04-2021	√		• Perbaiki Daftar pustaka • Perbaiki Hasil penelitian pada kembali Abstrak • Bab I perbaiki latar belakang tentang penelitian • Sesuaikan penulisan dengan buku panduan • Perbaiki Bab III	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				tentang hambatan dalam kasus penelitian • Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran	
3.	24-04-2021	√		• ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	
4.	01-05-2021		√	• Lengkapi Abstrak, kata pengantar, daftar singkatan, dan daftar isi • Perbaiki bab I latar belakang masalah	
5.	05-05-2021		√	• Jelaskan apa yang di maksd dengan PENAGANAN KASUS dalam perksrs sesuai dengan judul yang di teliti. • Pahami rasio pada tesis yang di tewliti. • Pahami pada populasi dan sampel yang akan di teliti • Perbaiki kesimpulan • Perbaiki penulisan kata depan	
6.	10-05-2021		√	• ACC Lanjutkan untuk ujian	

Pekanbaru, 20 Mei 2021
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 206/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelsaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor : 85/M/1999
   b. Nomor : 102/M/2001
   c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
   a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
   b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
   c. Nomor : 156/D/T/2007
   d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
   e. Nomor : 490/D/T/2007
   f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pfimpinan YLPI Daerah Riau :
   a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
   b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum** sebagai **Pembimbing I**
   b. Nama : **Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H** sebagai **Pembimbing II**

   Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
   Nama : **ADIL MULIA**
   N P M : **171021074**
   Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
   Judul Proposal Tesis : **"PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTEK DOKTER RUMAH SAKIT AWAL BROS WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 02 April 2019
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Unisiklversitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
Nomor: 085/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama	: **ADIL MULIA**
NPM	: **171021074**
Program Studi	: **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 31 Mei 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :
- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

turnitin **Turnitin Originality Report**

Analisis Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia (Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru) by Adil Mulia

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
24%	Internet Sources:	24%
	Publications:	3%
	Student Papers:	18%

Processed on 31-May-2021 15:40 WIB
ID: 1597695666
Word Count: 17667

sources:

1 6% match (Internet from 07-Jan-2021)
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/22509/31733

2 3% match (Internet from 17-Nov-2019)
https://peradi-tasikmalaya.or.id/kode-etik-advokat/

3 2% match (Internet from 25-Aug-2016)
https://id.scribd.com/doc/238360552/Kumpulan-Soal-Latihan-Ujian-Advokat-Indonesia

4 2% match (Internet from 26-May-2021)
https://vibdoc.com/malpraktik-advokat-dan-sanksi-kode-etiknya-5f0c3e388f631.html

5 1% match (Internet from 30-Sep-2019)
https://id.scribd.com/doc/285326863/ADVOKAT-Multi-Bar-Konsep

6 1% match (Internet from 13-Aug-2020)
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12148/1/MUH.%20IBNU%20TUPAIL%20ISKANDAR%2010100114141-.pdf

7 1% match (Internet from 14-Jun-2015)
http://blogkustar.blogspot.com/

8 1% match (Internet from 03-Nov-2020)
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47614/1/RISKY%20OKTAVIANTI-FSH.pdf

9 1% match (Internet from 28-May-2016)
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8836/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-EKO%20SEPTIYANTO%20SIMEN.pdf?sequence=1

10 1% match (Internet from 13-Oct-2018)
https://docobook.com/a-pengertian-advokat-digilibuinsbyacid.html

11 1% match (Internet from 22-May-2021)
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5264/5005

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ADIL MULIA, S.H
NPM	:	171021074
Tempat/Tanggal Lahir	:	Petapahan, 05-03-1992
Program Studi	:	Hukum Pidana
Alamat	:	Marpoyan Damai, Jl. Pembangunan B 04.
Judul Tesis	:	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH ADVOKAT INDONESIA Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Mei 2021

Yang Menyatakan,



ADIL MULIA, S.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia, Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satu pelanggaran yang terjadi tampak dalam kasus: PUTUSAN PERKARA NOMOR: 005/PERADI/DKD/PEKANBARU/I/2020, di mana Muslim Amir, S. H., Advokat yang beralamat kantor di jalan Ahmad Yani 117 AB, Kota Pekanbaru di Putus Oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Pekanbaru telah melangar kode Etik Profesi Advokat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat dalam menerima perkara.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru? Bagaimanakah Peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru? Apa kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah dengan cara survey,dan putusan yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia (Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru).

Dari hasil penelitian pelangaran kode etik sesama rekan sejawat iyalah dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat. Pengadu sesama advokat menerangkan bahwa Pengadu telah mengadukan sebuah kasus pelanggaran kode etik profesi advokat pada tangal 07 Mei 2019 lalu. Undang-Undang Advokat mendelegasikan kepada 8 (delapan) organisasi yang didirikan sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu "*untuk sementara* secara *bersama-sama menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat,* Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kendala tersebut diantaranya adalah mengenai sarana dan/atau Fasilitas yang kurang kendala lainnya adalah pengaruh biaya yang ditetapkan saat melakukan pengaduan kepada Kesekertariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

The only country in the world that has more than one advocate institution is Indonesia, for example, an advocate who has been sanctioned by an advocate organization can move to another organization to avoid being penalized for the offense he has committed. Supervision of the implementation of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is carried out by the Honorary Council of the Advocate Professional Code of Ethics, both central and regional, this is contained in articles 26 and 27 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in its development even though Law Number 18 of 2003 concerning Advocates still found violations committed by lawyers. One of the violations that occurred was evident in the case: DECISION OF PERKARA NUMBER: 005 / PERADI / DKD / PEKANBARU / I / 2020, in which Muslim Amir, SH, an Advocate having an office address at Jalan Ahmad Yani 117 AB, Pekanbaru City was broken by the Honorary Council The Regional Peradi Pekanbaru has violated the code of ethics for the Indonesian Advocate Profession, especially those related to the professionalism of advocates in terms of the authority of lawyers in accepting cases.

The main problem in this research is: How is the Code of Ethics for Indonesian Advocates Enforced in DPD Peradi Pekanbaru? What is the role of Peradi in maintaining and maintaining the Dignity and Honor of the Indonesian Advocate Profession in DPD Peradi Pekanbaru? What are the obstacles in enforcing the Indonesian Advocate Professional Code of Ethics at DPD Peradi Pekanbaru?

This type of research is by means of a survey, and decisions are research that takes samples from one population and uses interviews as the main data collection tool. Juridical Analysis of the Violation of the Professional Code of Ethics for Advocates by Indonesian Advocates (Peradi Oto Hasibuan at DPD Peradi Pekanbaru).

From the research results of the violation of the code of ethics of colleagues, it is in the provisions of Chapter IV that KEAI regulates the principles of the relationship between fellow advocates. An advocate is communicating or negotiating case matters, directly with someone who already has an advocate, without the presence of this person's advocate. explained that the Complainant had complained about a case of violation of the advocate professional code of ethics on May 7, 2019. The Advocate Law delegates to 8 (eight) organizations that were established before the Advocate Law, namely "to jointly carry out the duties and powers of the Advocate Organization, the regulation regarding supervision is carried out by the Advocate Organization according to Article 12 Paragraph (1) of the Law. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. These constraints include the lack of facilities and / or facilities. Other constraints are the effect of costs set when making a complaint to the Secretariat of the Regional Honorary Council of PERADI Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbill'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shollia'la Sayyidina Muhammad Waa'la Alihi Sayyidina Muhammad*, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang maju seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **"Analisis Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia (Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru)"**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis menngucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk Ibunda Tercinta , **Badaria** terimakasih atas do'a dan upaya yang telah membesarkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
2. Terkhusus Untuk Ayahhanda tersayang, **M Lazat** yang selalu menjadi motifasi penulis dalam penulisan tesis ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
6. Bapak **Dr. H. Efendi Ibnususilo, SH. M.H** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
8. Bapak **Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum** Selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya.
9. Bapak **Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H** Selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya.
10. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11. **Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta membantu memberikan kemudahaan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT.
12. Untuk Kakak dan Abang handa tersayang **Erlina** dan **Yurisman** trimakasih atas bimbingan dan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaiakn Magister Hukum.
13. Untuk adik-adik tersayang **Dedi, Putri Ayuni, Amat Romadhan, Jefry Albuchori, Irham Syah.** Yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaian Magister Hukum.
14. Untuk Adinda Tersayang **Aulia Rahma, S.H** yang selalu berada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Pekanbaru, [illegible] 2021

ADIL MULIA, S.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Masalah Pokok..... 8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 9

1. Kegunaan Teoritis..... 10

2. Kegunaan Peraktis..... 10

D. Kerangka Teori..... 10

1. Teori Negara Hukum..... 10

2. Teori kode etik propesi Advokat..... 19

E. Konsep Operasional..... 28

F. Metode Penelitian..... 29

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Advokat..... 32

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Propesi Advokat Indonesia.... 52

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan oleh Pemerintah dan Organisasi Terhadap Advokat Indonesia 56

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru..... 71

B. Peran Peradi dalam menjaga serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru..... 93

C. Kendala dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru..... 116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA..... 125

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanannya Kode Etik profesi Advokat dirasa masih berfungsi kurang optimal dalam menjaga dan menegakkan martabat profesi Advokat di Indonesia, oleh sebab itu Peradi sebagai salah satu organisasi advokat mempunyai peran dan fungsi penting untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Namun hal ini dirasa masih memiliki kendala dan gangguan untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari kedelapan organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi dalam kenyataannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat.

Tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, misalnya Advokat yang dijatuhi sanksi oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satu organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.[1]

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Advokat mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[2]

Dalam sumpahnya, Advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat juga tidak akan dengan sengaja atau menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Advokat akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.[3]

---

1 Supriadi, dalam *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hal 84 - 87

2 Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2001, hal 8-9.

3 Winarta, Frans Hendra, S.H. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016.Hal 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa:

a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan.
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi:

a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang Advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang – Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
b. Karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka Advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.[4]

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.[5]

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah

[4] http://www.scribd.com/doc/73639020/an-Advokat-Dalam-Menerima-Honorarium-Dari-Klien-Terdakwa-. diakses pukul 22.03 WIB 05 Maret 2021
[5] http://ksmfhumts.wordpress.com/2021/03/31/peranan-advokat-dalam-penegakan hukum-2/diakses pukul 21.30 WIB 05 Maret 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".[6]

Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Dijalankan tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun suatu sistem agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Sistem tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* (dapat dipercaya) diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif.

Sebagai profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi.

---

[6] www.ksmfhumts.wordpress.com tentang Advokat pasal 28 ayat (1), 05 Maret 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat UU Advokat.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Melanggar sumpah atau janji Advokat dan atau kode etik profesi Advokat.[7]

Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satu pelanggaran yang terjadi tampak dalam kasus: PUTUSAN PERKARA NOMOR: 005/PERADI/DKD/PEKANBARU/I/2020, di mana Muslim Amir, S. H., Advokat yang beralamat kantor di jalan Ahmad Yani 117 AB, Kota Pekanbaru di Putus Oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Pekanbaru telah melangar kode Etik Profesi Advokat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat dalam menerima perkara.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

[7] http://lawyersinbali.wordpress.com/2021/03/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/diakses pukul 00.54 WIB 05 Maret 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dengan judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia (Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru ?
b. Bagaimanakah Peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru?
b. Apa kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan Dan Mnfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui Peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru.
c. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
    a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia Wilayah Kasus Peradi Pekanbaru.
    b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat secara praktis

a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah Kode Etik Profesi Advokat.

b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".[8]

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.[9]

Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.[10]

---

[8] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006, hlm.30.

[9] O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2015, hlm.27.

[10] Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagai mana kutipan pendapat berikut ini:

"polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."(kursif-penulis)."[11]

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*.

Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,[12] kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

---

[11] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

[12] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum* …op. cit., hlm. 72.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah *"negara hukum"* atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan *"negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)"*, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *"rechtsstaat"*.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „ rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists"* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.[13]

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

[13] Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangikan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:[14]

Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

[14] Jimly Asshiddiqie, *Papper. Disampaikan dalam* Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
2. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
3. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*,

   seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

5. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
6. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.[15] Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*.

Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

2. Teori Kode Etik Propfesi Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.[16]

Menurut English Languange Dictionary advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.

---

[15] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan* … op. cit., hlm

[16] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktinya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undag-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.[17]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah penasehat hukum.[18]

Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan S. H. mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun

---

[17] Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

[18] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat bertindak baik secra pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.[19]

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. [20]

1. Sejarah Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003.

Sejarah terbentuknya Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 bermula dari keinginan advokat agar hak-hak dan kewajibannya mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat dibentuk oleh para advokat yang bergabung dalam organisasi advokat.

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki landraad (pengadilan negeri) dan raad van justitie (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocaten*.

---

[19] Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi.* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 6.

[20] Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah.

Kemudian, dalam Musyawarah I / Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.

Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi advokat tumbuh di Jakarta, seperti:

a. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum).
b. FOSKO ADVOKAT (Forum Studi dan Komunikasi Advokat).
c. HPHI (Himpunan Penasihat Hukum Indonesia).
d. BHH (Bina Bantuan Hukum).
e. PERNAJA.
f. LBH KOSGORO.

Kembali ke sejarah organisasi advokat, pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan Peradin dan organisasi- organisasi addvokat lain ke dalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H., Menteri Kehakiman Ali Said, S.H., dan Jaksa Agung Ismael Saleh, S.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal.

Kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia. Pada tanggal 15 September 1984, Peradin mengeluarkan surat edaran (sirkuler) yang berjudul Peradin Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.

Pada tanggal 24 Nopember 1984, Peradin mengeluarkan lagi surat edaran kedua yang berjudul Bar Nasional yang Mandiri, yang terurai dalam dua hal, yaitu:

a. Kata "mandiri" mengandung arti bebas, merdeka dan berdiri sendiri di dalam menjalankan misinya untuk mengisi kemerdekaan, menunjang dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya dan semua itu tentu saja berdasarkan keadaan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
b. Lebih lanjut kemandirian Bar Nasioanl dapat dijabarkan lagi menjadi:
    1. Berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keputusan itu mendapat efek sosial hukum, dalam arti mengikat dan harus ditaati oleh instansi penegak hukum lain, seperti polisi, hakim, jaksa dan lain-lain.
3. Bebas dari pengaruh pihak manapun.
4. Berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain catur wangsa.
5. Anggota bebas menganut agama, kepercayaan, keyakinan aliran poiltik yang sah, tetapi tidak dapat merangkap pekerjaan atau jabatan yang dapat mengakibatkan keterikatan yang akhirnya dapat menimbulkan confict of interest.

Jika dipahami, gagasan dalam surat di atas ternyata terwujud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 (hal-hal ini akan diuraikan secara panjang-lebar dalam pembahasan berikut), setidaknya dalam tiga hal:

1. Advokat adalah mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Advokat berhak untuk mengangkat dan memecat anggotanya.
3. Advokat diakui sebagai penegak hukum.

Kemudian, keinginan untuk membentuk Bar Nasional Mandiri tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Namun perlu dicatat dua hal dalam pembentukan wadah tunggal Ikadin:

1. Bahwa PERADIN tidak pernah dibubarkan; Peradin hanya masuk dalam ke dalam kondisi demisioner karena ditinggalkan anggota-anggotanya yang bergabung dalam Ikadin. Karena itu tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengherankan bahwa, pada Desember 2000, pengurus Peradin Cabang Jakarta memasang iklan di mingguan Tempo yang meminta anggota Peradin melakukan pendaftaran ulang.

2. Anggota PERADIN mencurigai bahwa ada satu rencana diam-diam untuk menempatkan para advokat di bawah kontrol pemerintah yang dicoba untuk dilakukan dengan menempatkan pensiunan militer pada organisasi advokat, sehingga ketua pertama Ikadin berasal dari kalangan militer dan dengan negosiasi yang sangat alot akhirnya Harjono Tjitrosoebono terpilih sebagai ketua pertama Ikadin.

Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berhenti sampai menciptakan wadah tunggal IKADIN, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen profesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bambu. Akan tetapi, rencana itu kandas karena ditentang advokat sendiri. Pemerintah akhirnya berpikir semakin realistis dengan memberikan izin pendirian Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 sebagai wadah pengacara praktik.

Memang, pada akhirnya Ikadin tidak dapat bertahan lama, karena tidak ditindak lanjuti secara konsisten oleh pendirinya. Terjadi perpecahan di tubuh Ikadin sebagai akibat dari sekelompok pengurus Ikadin tidak setuju dengan beleid (kebijakan) Dewan Pimpinan Pusat Ikadin dan puncaknya adalah insiden pada waktu berlangsung kongres sekitar tahun 1990 di Hotel Horison ketika sebagian anggota Ikadin mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena itu, sejak peristiwa tersebut di atas hingga tahun 2001, termasuk organisasi advokat di atas, ditemukan beberapa organisasi advokat:

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).
2. Asosiasi Advokat Indonsia (AAI).
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI).
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).
7. Badan Pembelaan & Konsultasi Hukum MKGR (BPKH MKGR).
8. Bina Bantuan Hukum (BHH).
9. Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum Kosgoro.
10. Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula).
11. Lembaga Pelayanan & Penyuluan Hukum (LPPH).
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia.
13. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).
14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
16. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).
17. Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (Pahsindo).
18. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
19. Jakarta Lawyers Club (JLC).
20. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (Perhumpus).
21. Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemungkinan masih ada organisasi advokat lain yang tidak terpublikasikan. Hal tersebut tidak terlalu mengherankan karena hal serupa terjadi dalam organisasi perkerja, yang berdasarkan keterangan dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, setidaknya ada 68 serikat pekerja yang terdaftar dan hal tersebut dipandang sebagai penghambat investasi.

Seiring dengan perjalanan waktu, organisasi-organisasi advokat tumbuh subur, sedangkan undang-undang advokat belum ada. Karena itu, niat untuk membentuk satu Organisasi Profesi Advokat Indonesia (Indonesia Bar *Association*) tumbuh makin besar.

Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang- undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.[21] Hal itu merupakan tonggak sejarah besar dalam dunia hukum Indonesia. Alasannya ialah karena kehadiran undang-undang tersebut telah sangat lama dinantikan oleh para advokat sebagai payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya sebagai profesional hukum. Perlu dicatat dan ditegaskan bahwa pengundangan dan pemberlakuan undang-undang advokat tersebut terjadi pada waktu yang sama.

[21] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **"Analisis Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia (Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru)".**

1. Analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.[22]
2. Yuridis adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
3. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
4. Kode Etik adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat, Advokat

[22] Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan cara Analisis Yuridis dan survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi Putusan dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis Yuridis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisa Yuridis Terhadap Pelangaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Advokat Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu Peradi Oto Hasibuan di DPD Peradi Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Majelis Dewan Kehormatan 1 orang.
2. Advokat Aktif yang pernah Teradu Peradi Pekanbaru 1 Orang.
3. Terbanding atau Pengadu 1 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan berkas Putusan dan Pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat pengumpulan data yaitu: 1) Studi dokumen; 2) Pengamatan; 3) Wawancara. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang utama adalah studi dokumen atau studi pustaka, yaitu mencari data melalui informasi yang terkumpul dari buku-buku, putusan-putusan, makalah, bulletin, internet dan sebagainya. Selain itu juga mengambil data dari hasil wawancara dengan pejabat instansi yang bersangkutan misalnya PERADI.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

8. Sistematika Penulisan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah advokat Indonesia.

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.[23] Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.[24] Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat.[25]

Kata "advokat" berasal dari bahasa Latin "*advocatus*", bentuk *past participle* dari "*advocare*" yang berarti "memanggil untuk sidang".[26] Jabatan "*advocatus*" ini dapat ditelusuri kembali sampai ke daratan Eropa pada awal abad kelima ketika pemimpin gereja sangat membutuhkan "orang biasa" yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam hal-hal yang bersifat sekular. Orang-orang yang dikenal sebagai "*advocatus ecclesiae*" ini bertugas mewakili para *bishop* maupun *abbot* di pengadilan khususnya dalam membela dan melindungi kekayaan pihak gereja.

---

[23] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74.
[24] *bIid* ., hlm. 62.
[25] *bIid* ., hlm. 65.
[26] *hTe American Heritage Dictionary of The English Language* , 3rd edition. (Boston: Houghton Mifflin, 2010), hlm. 26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada Jaman Pertengahan yang feodal itu, para *advocatus* ini lalu berkembang menjadi kelas tersendiri dengan mendapat imbalan berupa tanah *fief* yang dapat diwariskan secara turun temurun,[27] dan kata "*advocatus*" lambat laun mengacu kepada "orang yang membantu seseorang dalam perkara" atau "pembela".[28] Dari bahasa Latin, kata "*advocatus*" ini berkembang menjadi "*advocate*" (bahasa Inggris), "*avocats*" (bahasa Perancis), "*advokat*" (bahasa Jerman), dan "*advocaat*" (bahasa Belanda) yang dieja menjadi "advokat" dalam bahasa Indonesia.

Sebagai istilah teknis, kata "advokat" lebih banyak digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi.[29] Dalam sistem hukum yang bersumber pada sistem Anglo-Saxon, padanan untuk kata "advokat" adalah "*barrister*".[30] Menurut Black's Law Dictionary, *barrister* atau advokat adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum dan mendapat ijin untuk membantu, memberikan nasihat tentang hukum atau membela seseorang dalam sidang pengadilan, berbeda dengan *attorney* (kuasa) yang merupakan wakil atau pengganti yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menggantikan posisi seseorang dalam hal merancang pembelaan, mempersiapkan bukti-bukti, dan mengatur hal-hal di luar pengadilan. Bila *attorney* ini muncul dalam persidangan maka istilah yang digunakan adalah "*attorney at law*" (kuasa hukum).[31]

---

[27] http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30

[28] K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin – Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 22.

[29] http://dictionary.reference.com/browse/advocate diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30

[30] http://en.wikipedia.org/wiki/Advocate diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30.

[31] http://blackslawdictionary.org diunduh pada 2 April 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di Amerika Serikat, "*advocate*" tidak mengandung rujukan khusus, kata ini dapat digunakan secara fleksibel untuk menggantikan kata-kata "*attorney*", "*counsel*" ataupun "*lawyer*".[32] Begitu pula dalam bahasa Belanda, kata "*advocaat*" mencakup pengertian "pembela", "penasehat hukum", "pokrol bambu" (*met geringe opleiding*) dan "pengacara" (*procureur*).[33]

Profesi advokat tidak lahir dan berkembang sendiri pada bumi persada Nusantara, melainkan didatangkan dalam bentuk yang sudah matang dan utuh dari negeri Belanda. Hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa selama kurang lebih tiga setengah abad, Indonesia merupakan tanah jajahan Belanda.

Sebenarnya pada awal masa penjajahan, yang diterapkan Belanda adalah sistem penguasaan secara tidak langsung yaitu melalui aliansi politik dengan para priyayi di Pulau Jawa. Dengan adanya penggolongan penduduk dan aplikasi hukum yang berbeda, orang Eropa mendapat keuntungan paling besar baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu perlu ditetapkan aturan-aturan untuk menghindari golongan lain mengasimilasikan diri ke dalam golongan Eropa.

[32] http://dictionary.reference.com/browse/advocate diunduh pada 24 Naret 2021 pukul 10.45

[33] Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2011), hlm. 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aliansi ini menguntungkan kedua pihak karena kaum elite Jawa bisa mempertahankan otoritas mereka dan orang Belanda dapat mengelola tanah Jawa bagaikan sebuah kebun raya dalam kondisi yang relatif stabil.[34] Cara ini sesuai dengan kebutuhan Belanda agar dapat mengeksploitasi kekayaan pertanian di Jawa secara efisien, dan pada saat yang sama juga cocok dengan tradisi sosial politik orang Jawa yang bersifat patrimonial.[35] Namun pada pertengahan abad ke-19, sebagai akibat dari gelombang liberalisasi di negara induknya, kewenangan prerogatif penguasa Belanda di Indonesia mulai beralih ke arah prinsip legalitas. Sejak tahun 1840, berbagai macam hukum mulai ditetapkan, kebijakan dan organisasi yudisial dikembangkan dan dibenahi, administrasi pemerintahan dirasionalisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Reorganisasi ini secara signifikan telah mempersiapkan tanah jajahan ini menuju ke dalam bentuk sebuah *rechtsstaat* (negara hukum).[36]

Akan tetapi, kekuasaan Belanda ini sebenarnya tidak menyebar secara merata ke seluruh Kepulauan Indonesia sampai akhir abad 19 dan awal abad 20. Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau kecil lainnya masih terdapat banyak kelompok etnis dengan sejarah, kebudayaan, organisasi sosial dan sistem politik yang sangat berbeda. Beberapa etnis ini dapat ditaklukkan oleh Belanda, sedangkan dengan yang lain tercapai persetujuan melalui negosiasi.

---

[34] Daniel S. Lev, "Origins of the Indonesian Advocacy," *Hukum dan Keadilan 3*. (September – Oktober 2000), hlm. 36.

[35] *bIid* ., hlm. 37.

[36] K. Prent, J. Adisubrata *Kamus Latin – Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 22.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di beberapa tempat, otoritas lokal dan pranata tradisional dibiarkan eksis, di tempat lain institusi kolonial diterapkan menurut pola Jawa tetapi diatur dengan hukum yang berbeda. Pembedaan ini terutama didasarkan pada pertimbangan apakah kekuasaan Belanda pada wilayah itu bersifat langsung atau tidak.[37]

Sebagai akibat dari beragamnya latar belakang tersebut maka dalam manajemen pemerintahan, Belanda menerapkan beberapa prinsip yaitu:[38]

1. Membagi penduduk Indonesia kedalam beberapa golongan menurut kriteria ras atau keturunan yaitu golongan Eropa, Pribumi dan Timur Asing yang masing-masing memainkan peran ekonomi yang sangat berbeda. Golongan Eropa terutama terdiri dari orang Belanda yang memegang kendali politik dan ekonomi atas tanah jajahan ini, Pribumi adalah produsen utama sedangkan Timur Asing berfungsi sebagai orang tengah dalam kegiatan perekonomian. Untuk masing-masing golongan ini berlaku hukum yang berbeda-beda.
2. Dengan adanya penggolongan penduduk dan aplikasi hukum yang berbeda, orang Eropa mendapat keuntungan paling besar baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu perlu ditetapkan aturan-aturan untuk menghindari golongan lain mengasimilasikan diri ke dalam golongan Eropa.

[37] *bIid* .hal 98
[38] *bIid* ., hlm. 38

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Membiarkan hukum adat tetap berlaku kecuali bila "mengganggu keadilan dan moralitas.

Sistem hukum yang plural tersebut bukan hal yang aneh dalam daerah jajahan orang-orang Eropa, dimana pengadilan orang Eropa sering berdampingan dengan pengadilan agama maupun pengadilan adat untuk rakyat yang dijajah. Fakta sejarah ini perlu dikemukakan agar kita dapat memahami struktur institusional di mana akhirnya muncul advokat-advokat Indonesia.[39]

Sama seperti daerah jajahan yang lain, di Netherlands Indies juga terdapat beberapa jenis pengadilan. Di antaranya yang paling utama adalah Pengadilan untuk orang Eropa dan Pengadilan untuk orang Indonesia, disamping Pengadilan Islam dan Pengadilan Adat yang tidak dianggap penting. Pengadilan untuk orang Eropa merupakan pengadilan yang paling dominan dan berada di atas jenis pengadilan yang lain. Pengadilan ini terdiri dari *residentiegerecht* sebagai pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropa, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan banding dan *Hooggerechtshof* atau Mahkamah Agung. Penuntutan di muka pengadilan ini dilakukan oleh *officier van justitie* sebagai jaksa. Komunitas utama yang dilayani oleh Pengadilan Eropa ini adalah orang Belanda, dan semua hakim dan jaksa yang bekerja di sini adalah pengacara-pengacara pemerintah Belanda yang dididik oleh fakultas hukum di Belanda.[40]

---

[39] *bIid* ., hlm. 39.
[40] *bIid* ., hlm. 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan untuk orang Indonesia juga terdiri dari tiga tingkat yaitu *districtsgerecht* (pengadilan distrik), *regentschapsgerecht* (pengadilan kabupaten), dan *landraad*. *Landraad* ini merupakan cikal bakal Pengadilan Negeri yang kita kenal sekarang, tersebar pada 80 kabupaten yang ada di Jawa, Madura dan beberapa kota di luar Jawa. Sebagian besar hakim di *landraad* ini adalah orang Belanda. Sampai pada tahun 1920-1930 baru ada beberapa pengacara pemerintah keturunan Indonesia asli yang ditunjuk untuk menduduki posisi hakim tersebut. Sedangkan jaksa dalam *landraad* ini adalah pejabat yang posisinya sangat rendah dibandingkan dengan *officier van justitie* di Pengadilan untuk orang Eropa.

Ia tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan pelatihan itu memang dianggap tidak perlu sebab Ketua *Landraad* sendiri yang akan menyusun naskah penuntutan. Dalam sidang *landraad*, advokat diperbolehkan tampil namun hal ini bukan kewajiban, sebab H.I.R. mengijinkan para pihak untuk mewakili mereka sendiri dalam pengadilan dengan mendapat bantuan apa saja dari hakim atau pegawai pengadilan. Alasan kebijakan ini adalah tidak semua orang sanggup membayar ongkos jasa advokat, kalau mereka diwajibkan menggunakan jasa advokat maka itu akan sangat memberatkan.[41] Dalam keadaan seperti ini, kalau orang yang berperkara memutuskan untuk memilih penasihat, maka dia tidak membutuhkan jasa seorang advokat, tetapi cukup mempekerjakan seorang pokrol bambu untuk mewakilinya di pengadilan.[42]

---

[41] Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan*, cetakan kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 14.

[42] Daniel S. Lev, *op. cit.*, hlm. 48.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini berbeda dengan *Hooggerechtschof* dan *Raad van Justitie*, dimana para pihak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada seorang *procureur* yang sudah mendapat ijin pemerintah. Kewajiban mewakilkan bagi penggugat dinyatakan dalam Pasal 106 ayat (1) BRv (*Burgerlijke Rechtsvordering*) dan bagi tergugat dinyatakan dalam Pasal 109 B.Rv.[43] Orang-orang yang harus berperkara di *Raad van Justitie* tetapi tidak mampu membayar jasa advokat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan tarif yang dikurangi.

Bila seorang advokat ditunjuk untuk menjalankan tugas secara cuma-cuma maka ia tidak dapat mengelak kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Ketua Majelis Hakim.[44]

Pemerintah kolonial Belanda tak pernah mendorong orang-orang Indonesia untuk berpraktek sebagai advokat swasta sebab perdagangan kelas atas semua berada di tangan orang-orang Eropa, dengan sendirinya para pedagang lebih percaya pada advokat dan notaris Belanda. Begitu pula pedagang China dengan pertimbangan bahwa sistem hukum didominasi oleh pejabat orang-orang Belanda, maka jelas lebih masuk akal kalau mendapat nasihat dari orang Belanda.[45]

---

[43] Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 55.
[44] Daniel S. Lev, *op.cit.*, hlm. 49.
[45] *bIid* ., hlm. 49-50.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di dalam masyarakat orang Indonesia sendiri, kehadiran advokat privat juga bukan sesuatu yang dapat diterima dengan baik, terutama di kalangan orang Jawa. Sebab orang Jawalah yang pertama mendapat kesempatan untuk belajar hukum, akan tetapi pendidikan hukum ini bertujuan untuk menghasilkan pejabat pemerintahan, maka hanya anak-anak dari golongan priyayi yang diperbolehkan untuk ikut. Pada jaman itu, status sosial seseorang berkaitan erat dengan posisinya di dalam birokrasi pemerintah. Segala macam pekerjaan yang bersifat swasta, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dipandang rendah dan tidak berharga. Oleh sebab itu hanya sedikit sekali anak-anak priyayi yang didorong untuk menjadi advokat swasta.[46]

Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua perubahan yang dapat mendorong munculnya advokat swasta di Indonesia. Pertama adalah perubahan institusional yaitu pendidikan hukum harus terbuka untuk semua orang-orang Indonesia. Kedua harus ada perubahan sikap dan kultur, yaitu orang Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan di bidang hukum harus bisa merasa nyaman di tengah masyarakat bila mereka bekerja di sektor swasta.

Akan tetapi ketika pemerintah Belanda mengumumkan pembukaan sekolah hukum untuk orang Indonesia, para pengacara Belanda mengajukan protes. Alasan mereka adalah "pribumi" tidak akan memenuhi persyaratan pendidikan hukum yang begitu ketat.

[46] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 95- 99.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada yang khawatir prestise hukum akan tercemar dengan hadirnya "pribumi". Akan tetapi kelihatannya yang mereka takuti sebenarnya adalah bila muncul pengacara orang Indonesia, maka permintaan terhadap jasa advokat orang Belanda akan berkurang. Walaupun ada protes ini, pemerintah Belanda tetap membuka sebuah *Rechtsschool* di Batavia pada tahun 1909.[47]

Lama pendidikan di *Rechtsschool* ini adalah 6 (enam) tahun, kurikulumnya menekankan hukum pidana dan acara pidana. Aturan di sekolah hukum ini sangat ketat sehingga hanya sepertiga dari siswa yang diterima dapat lulus. Dari wisuda pertama tahun 1915 sampai ditutup pada tahun 1928, *Rechtsschool* ini berhasil meluluskan sekitar 150 siswa.

Akan tetapi para lulusan *Rechtsschool* yang disebut *rechtskundigen* ini masih belum memenuhi syarat untuk menjadi advokat atau notaris karena mereka hanya dididik untuk menjadi pegawai pengadilan, jaksa atau hakim, kurang dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan di bidang hukum perdata dan acaranya.[48] Pada akhir tahun 1910-an, lulusan *Rechtsschool* diberi kesempatan belajar di Belanda untuk meraih gelar *meester in de rechten*. Pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada beberapa siswa dengan ikatan dinas, yang tidak mendapat sponsor dari pemerintah pergi dengan biaya sendiri.[49]

---

[47] Soekanto, Soejono, 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.hal 56

[48] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,*Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.hal, 83

[49] Tim Redaksi New Justissica, 2006, *Jurnal Hukum*, Vol.1, Surakarta: New Justissica.hal 50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di kemudian hari, mereka yang tidak melanjutkan studi lebih lanjut ke Belanda ini cenderung dipandang sebelah mata oleh siswa lulusan Belanda ataupun sekolah tinggi hukum di Batavia. Walaupun begitu, tidak berarti lulusan *rechtsschool* ini tidak bermutu. Bapak R. Soeprapto, Jaksa Agung Indonesia dari tahun 1951-1959 yang sangat dihormati itu adalah seorang *rechtskundigen* tanpa melanjutkan studi hukum lanjutan di Belanda maupun Batavia.[50]

Pada tahun 1924 pemerintah Belanda mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia dengan nama *Rechtshogeschool*. Yang diangkat sebagai pemimpin sekolah ini adalah Profesor Paul Scholten. Pada tahun 1928 sekolah tinggi ini mulai meluluskan siswanya dengan gelar *meester in de rechten*. Pada tahun 1939, jumlah orang Indonesia asli yang bergelar hukum ini tercatat 274 orang. Diantaranya 108 orang telah belajar di Leiden, 9 di Utrecht, sisanya ada 146 orang adalah lulusan *Rechtshogeschool* di Batavia.[51]

Dengan adanya lembaga pendidikan di bidang hukum tersebut, maka prasyarat institusional untuk munculnya pengacara swasta sudah terpenuhi. Prasyarat kedua yang berkaitan dengan kultur, yaitu adanya sikap positif orang Indonesia terhadap pekerjaan di sektor swasta juga muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 1908, sejalan dengan berdirinya Boedi Oetomo muncul pula beberapa partai politik seperti Sarekat Islam, PNI dan PKI. [52]

---

[50] Bapak R. Soeprapto, Jaksa Agung Indonesia, Jakarta. Hal 72

[51] Rambe, Rapaun, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT. Grasindo.hal 84

[52] Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Bima Akasar.hal 125

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ideologi nasionalisme dan anti-kolonialisme yang menyebar luas telah mendorong beberapa kalangan untuk menolak bekerja-sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi politik, gerakan sosial, kelompok pelajar, dan para pengarang mulai membangkitkan kesadaran akan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengurus masalahnya sendiri. Akibatnya, orang-orang Indonesia yang bekerja pada pemerintahan Belanda tetapi selalu tidak puas dengan status "pribumi"nya pun mulai merasa terusik secara moral.[53]

Walau begitu, sebagian besar pengacara lulusan Indonesia masih menerima tawaran Belanda untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, sebagian karena wajib oleh ikatan dinas, sebagian karena tujuannya belajar hukum memang ingin menjadi pegawai negeri.[54]

Sementara itu di Belanda, para mahasiswa hukum mempunyai kesempatan dan pandangan yang berbeda. Pengalaman mereka di sana menunjukkan kepada mereka akan sebuah model karir yang sama sekali berbeda daripada yang ada dalam konteks kolonial, dan pada waktu yang sama juga memberikan mereka perspektif atau pandangan yang baru pada diri mereka sendiri. Di Belanda mereka mengalami semacam perasaan baru untuk mengapresiasi dirinya sendiri, tidak seperti ketika di tanah Jawa, dimana orang Jawa sendiri bahkan memandang rendah orang Jawa. Di Belanda, mereka belajar untuk menghargai diri, dan mulai sadar bahwa dirinya tak akan kembali ke tanah air hanya untuk bekerja pada pemerintah kolonial.[55]

---

[53] B, Simanjuntak dan Pasaribu I.L, *Kriminologi.* Bandung: Tarsito, 1984.hal 87
[54] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.hal 71
[55] Simanjuntak.B.dan Pasaribu I.L, *Kriminologi,* (Bandung:Tarsito 1984).hal 90

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tentu saja pengacara muda yang ingin membuka kantor sendiri menghadapi banyak kesulitan ketika mereka kembali ke Indonesia. Kesulitan utama bukan masalah modal karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga berada. Kendala mereka yang paling besar adalah kesempatan berkembang di tengah lahan yang sudah didominasi oleh orang-orang Belanda, karena pengacara Belanda berhubungan baik dengan pengusaha Belanda dalam suatu sistem hukum yang secara penuh dikendalikan oleh pejabat-pejabat Belanda pula.

Walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan, para pengacara muda ini tidak pernah patah semangat. Akhirnya pada tahun 1923, dibukalah kantor pengacara swasta pertama oleh orang Indonesia yang bernama Besar Mertokusumo di kota Tegal.

1. Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Advokat

   a. Zaman Hindia Belanda

   Pada masa penjajahan oleh Belanda, para advokat di Indonesia diatur oleh sebuah peraturan yang dinamakan "*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch-Indie*" (*St.* 1847-23 jo 1847-57 "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Hindia Belanda") yang disingkat menjadi "RO". Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[56]

[56] Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.hal 87

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Warga negara Belanda di Batavia atau bergelar doktor dalam ilmu hukum, atau mencapai gelar *meester in de rechten* setelah lulus dalam ujian hukum perdata dan dagang, hukum tatanegara dan hukum pidana.

Advokat diangkat dan diberhentikan oleh *Gouveneur Generaal* (Gubernur Jenderal). Sebelum mereka menerima jabatan advokat, diadakan pengambilan sumpah di hadapan Ketua *Raad van Justitie* dalam sidang Majelis Pengadilan tempat mereka diangkat.[57]

Advokat yang berpraktek di *Raad van Justitie* dalam menjalankan tugasnya terikat dengan *Raad van Justitie* tempat mereka diangkat. Sedangkan advokat yang diijinkan berpraktek di *Hooggerechtshof* dapat menangani perkara perdata di *Hooggerechtshof* maupun *Raad van Justitie* di Batavia, dan perkara pidana di seluruh Jawa.[58]

Advokat yang mendapat ijin praktek di *Raad van Justitie*, wajib menangani kasus secara cuma-cuma atau dengan separuh honorarium bila ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sudah mendapat dispensasi *pro deo* ataupun dengan tarif yang dikurangi. Mereka juga wajib membela perkara pidana secara gratis apabila diperintah oleh hakim. Mereka tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Majelis hakim yang bersangkutan. Dalam menetapkan honor perkara dan uang muka, advokat wajib mengikuti dasar tarif yang sudah ada atau tarif yang akan ditentukan lebih lanjut. [59]

---

[57] Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.hal 97

[58] Sumaryono, E. *FilsafatHukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.hal 54

[59] Sumaryono, E. *ProfesiAdvokat*. Jakarta: Erlangga, 1991.hal 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Majelis Hakim berkewajiban mengawasi tingkah laku para advokat yang diijinkan berpraktek di lingkungan pengadilannya. Untuk menjalankan tugas pengawasan ini, Majelis Hakim dibantu oleh dua orang advokat sebagai pendamping. Dua orang pendamping ini dan dua orang pengganti mereka bila berhalangan, dipilih dari para advokat dan diangkat oleh Gubernur Jenderal untuk masa tiga tahun. Perihal pengangkatan ini Gubernur Jenderal dapat meminta saran dari Ikatan Advokat yang berpraktek pada pengadilan tersebut.[60]

Majelis Hakim berwenang menegur para advokat yang berpraktek di pengadilannya apabila advokat ini:[61]

a. Mengabaikan kepentingan kliennya.
b. Bertingkah laku tidak pantas terhadap pihak yang berperkara atau advokat lain.
c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan selaku advokat.
d. Menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Majelis atau anggotanya, ataupun pejabat pengadilan lainnya.
e. Menggunakan kata-kata yang tidak patut terhadap Undang-undang atau Kekuasaan Pemerintah, atau bahkan tidak patut menurut keadaan.

Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa:

---

[60] *bIid* ., hlm. 16.
[61] *bIid* ., hlm. 16-17.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pemecatan sementara (skorsing) paling lama enam bulan; atau

b. Denda paling tinggi f. 200; atau

c. Membayar ganti kerugian sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang menderita karena kesalahan atau kelalaian advokat.[62]

Terhadap putusan tersebut, advokat yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke *Hooggerechtshof* dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan.

Dalam mengambil keputusan tentang permohonan banding ini, para hakim dapat melibatkan pendamping yang diangkat khusus untuk *Hooggerechtshof* dalam sidangnya. Bila kelakuan advokat yang dianggap tidak pantas itu terulang kembali atau kelakuan itu dianggap telah melampaui batas yang wajar, maka atas usul dari *Raad van Justitie*, *Hooggerechtshof* dapat mengusulkan pemecatan kepada Gubernur Jenderal.[63]

a. Zaman Pendudukan oleh Tentara Jepang

Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Maret 1942. Tanggal 7 Maret 1942, Panglima Besar Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-undang No.1 untuk daerah Jawa dan Madura. Di antaranya terdapat satu pasal berisi ketentuan peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

---

[62] Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat.* Cet. I: Bandung: Yrama Widya, 2016.97

[63] Sarmadi, H. A. Sukris. Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini. Jakarta: Bina Cipta, 2009.45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Semua badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah dahulu, tetap diakui sah sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Pemerintah Militer." [64]

Pemerintah Militer Jepang kemudian menghapuskan *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* dan mengadakan unifikasi pengadilan menjadi hanya dua tingkat yaitu *Chiho Hoin* (Pengadilan Negeri) dan *Koto Hoin* (Pengadilan Tinggi).[65] Hanya perombakan ini yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang karena kekuasaannya tidak berumur panjang akibat jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945, dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya beberapa hari kemudian.

b. Zaman Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak zaman Belanda tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Hal ini diatur pada Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka secara yuridis semua peraturan peninggalan Belanda yang mengatur kegiatan advokat tetap berlaku sampai Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dikeluarkan. Selama 58 tahun masa penantian ini, kegiatan advokat masih diatur dengan peraturan peninggalan zaman Belanda

[64] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Tahun 1991, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.hal 181

[65] Magnis Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.hal 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang seperti UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UU No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan peradilan Ulangan, UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahmamah Agung Indonesia, UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[66]

Dengan adanya UU No.18 tahun 2003 sebagai *lex speciali*, maka pelaksanaan tugas advokat sebagai *officium nobile* seharusnya bisa lebih terarah karena sudah mempunyai landasan yuridis yang terpadu dan jelas. Beberapa bagian dari Undang- Undang ini yang akan dijadikan bahan studi banding untuk penelitian ini akan diuraikan berikut ini.

3. Persyaratan untuk Menjadi Advokat

Dalam UU tentang Advokat ditetapkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Persyaratan penting lain adalah tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara, berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun, lulus ujian Advokat, magang paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus di kantor Advokat, tidak pernah dipidana karena kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi. (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3).

[66] Soekanto, Soerjono. Cetakan pertama tahun 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya CV.hal 96

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Advokat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diangkat oleh "Organisasi Advokat" (*vide* ayat (2) Pasal 2) dan sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. (*vide* ayat (1) Pasal 4).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini menetapkan bahwa seorang Advokat dapat diberhentikan secara tetap dari profesinya apabila ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau berdasarkan keputusan oleh "Organisasi Advokat". Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

4. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia

Bab IV Undang-Undang ini menjamin bahwa Advokat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkaranya (Pasal 14), dan bebas menjalankan tugas profesinya (Pasal 15). Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, ia berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembelaan kliennya, dan berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen dari penyitaan atau pemeriksaan, serta perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektroniknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 18 ayat (1) melarang Advokat bersikap diskriminatif terhadap kliennya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Advokat juga dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, atau jabatan lain yang merugikan atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam manjalankan profesinya. (Pasal 20).

5. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Advokat

Pasal 6 menetapkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan seorang Advokat dikenakan tindakan misalnya menelantarkan kliennya, berbuat tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi, bertingkah laku atau bersikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Advokat juga akan ditindak bila ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, Pasal 7 ayat (1) sudah menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan atau pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai Advokat.

6. Ketentuan Pidana dalam UU Advokat Indonesia

Dalam UU No. 18 tahun 2003 hanya terdapat satu pasal Ketentuan Pidana yaitu Pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan betindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Namun pasal ini oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal 8 Desember 2004.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, Pasal 26 ayat (1) UU Advokat memberikan wewenang kepada "Organisasi Advokat" untuk menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para Advokat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, tanggal 1 Oktober 2002 sebelumnya sudah ada pernyataan dari Komite Kerja Advokat Indonesia bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berlaku sejak tanggal 23 Mei 2002. Beberapa bagian penting dari KEAI diringkas di bawah ini.

1. Aturan Umum

Kode Etik Advokat Indonesia mencantumkan beberapa larangan dan kewajiban bagi Advokat, antara lain larangan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat (Pasal 3f). Advokat Indonesia juga dilarang merangkap jabatan Negara (Pasal 3i), dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang termasuk memasang papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan (Pasal 8b), dilarang membuka kantor atau cabang di tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat (Pasal 8c), dilarang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengijinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantornya atau mengijinkan orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Advokat (Pasal 8d), dilarang mengijinkan karyawanya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum (Pasal 8e), dilarang mencari publisitas melalui media massa untuk menarik perhatian mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip- prinsip hukum (Pasal 8f).

Disamping larangan tersebut di atas, advokat Indonesia juga diwajibkan memperjuangkan hak asasi manusia (Pasal 3c), wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat (Pasal 3h). Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (Pasal 3g), dan harus bersikap sopan terhadap semua pihak (Pasal 3h).

Mengenai cara bertindak dalam menangani perkara, advokat diperbolehkan mengeluarkan pernyataan atau pendapat dalam rangka pembelaan perkara secara bebas, proporsional dan tidak berlebihan (Pasal 7g).

2. Hubungan Advokat dengan Klien

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya dengan berbagai larangan dan kewajiban. Misalnya advokat dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4b), dilarang menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang (Pasal 4c), dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4e), dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien (Pasal 4i).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Dalam hal menentukan honorariumnya, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4d). Dia wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien dan menjaga rahasia itu setelah hubungan dengan klien tersebut berakhir (Pasal 4h), wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan bila klien hendak berpindah ke advokat lain (Pasal 5f), wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 5h), wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan kepada klien pada waktunya (Pasal 5i). Advokat Indonesia juga mempunyai keharusan memberikan perhatian yang sama terhadap klien *pro deo* seperti terhadap klien lain yang membayar (Pasal 4f), harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4g).

Namun dibalik larangan, kewajiban dan keharusan tersebut di atas, advokat boleh menolak klien dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3a), boleh mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusinya apabila timbul perbedaan tentang cara penanganan perkara dan tidak tercapai kesepakatan dengan kliennya (Pasal 8g), dan advokat mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4k).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Hubungan sesama Teman Sejawat

Dalam menjalankan pekerjaannya, antara advokat harus saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai di antara teman sejawat (Pasal 5a). Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat (Pasal 5d), dia boleh menerima klien dari advokat lain apabila kewajiban klien terhadap advokat semula sudah terpenuhi (Pasal 5e).

Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3d), wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3e).

4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan

Advokat Indonesia harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara perdata (Pasal 4a). Ia dilarang menggunakan informasi mediasi yang gagal sebagai bukti di muka pengadilan (Pasal 7b), juga dilarang menghubungi hakim dalam perkara perdata yang sedang berjalan, kecuali bersama-sama dengan advokat pihak lawan (Pasal 7c). Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat dilarang menghubungi hakim yang sedang berjalan kecuali bersama-sama dengan jaksa penuntut umum (Pasal 7d), dan dilarang mengajari dan atau mempengaruhi saksi- saksi yang diajukan oleh pihak lawan atau jaksa penuntut umum (Pasal 7e).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan oleh Pemerintah dan Organisasi Terhadap Advokat Indonesia.

1. Peraturan oleh Pemerintah Terhadap Advokat Indonesia

Pada waktu UU tentang Advokat disahkan pada tahun 2003, masih berlaku Undang- Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 36 Undang- Undang ini ditetapkan bahwa "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris." Kemudian berdasarkan Pasal 36 ini, dikeluarkan peraturan pelaksana berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Juli 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum yang pada intinya menentukan:

a. Bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para penasihat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman (*vide* ayat (1) Pasal 2).
b. Bahwa seorang penasihat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan klien, bertingkah laku tidak patut pada lawannya, melakukan *contempt of court*, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban profesi dan lain-lain. Penasihat hukum yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi penindakan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah yang terdapat pada Pasal 4 yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Teguran dengan lisan atau tertulis.
2. Peringatan keras dengan surat.
3. Pemberhentian sementara dari jabatan advokat selama tiga bulan sampai dengan enam bulan.
4. Pemberhentian dari jabatan sebagai advokat (pencabutan ijin praktek sebagai advokat).

Berdasarkan SKB ini, maka advokat selain berada di bawah pengawasan badan yudikatif (Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung), juga berada di bawah pengawasan badan eksekutif (Pemerintah/Menteri Kehakiman). Loekman Wiriadinata, mantan Menteri Kehakiman RI pernah menyatakan bahwa SKB ini tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.[67]

Dengan adanya UU Advokat tahun 2003 maka profesi advokat bertambah lagi satu pengawasnya dari pihak swasta yaitu "Organisasi Advokat".

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) bahwa "Penindakan terhadap Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik profesi Advokat" dan Pasal 12 ayat (1) bahwa "Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat".

[67] Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, cetakan pertama, (Jakarta: YLBHI, 1989), hlm. 60-64.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat ini, Prof. Soebekti pernah mengusulkan agar pada Mahkamah Agung ditunjuk beberapa orang Hakim Agung dan beberapa orang dari Pengurus Pusat Persatuan Para Pembela/Pengacara oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan pada tingkat tertinggi terhadap tingkah laku para pembela/pengacara di seluruh Indonesia.[68] Tidak jelas mengapa ide ini tidak pernah terwujud.

Walaupun akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tetapi Pasal 36 ini tetap tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 September 2004 beberapa advokat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi agar Pasal 36 UU No. 14 tahun 1985 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah melalui proses peradilan selama hampir lima bulan, akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Dasar pertimbangan Majelis Hakim MK antara lain adalah:

[68] Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court, Suatu Proses di Dewan Kehormatan Pusat*, cetakan kedua, edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002).hal 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. bahwa setelah keluar UU No. 8 tahun 2004, kata ‘penasihat hukum’ dalam Pasal 54 UU No.2 tahun 1986 telah dihapus. Dengan demikian, penasihat hukum (yang disebut Advokat setelah pengundangan UU No.18 tahun 2003) sejak saat itu telah tidak lagi berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (*vide* halaman 28-30 Putusan MK).

b. bahwa berdasarkan Pasal 91 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 54 UU No. 8 tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (*vide* halaman 30 Putusan MK).

c. bahwa rangkaian perubahan dalam sejumlah undang-undang di atas, telah membawa implikasi yuridis sehingga pengawasan terhadap advokat yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi; (*vide* halaman 30-31 Putusan MK).

d. bahwa berlaku Pasal 12 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU No. 14 tahun 1985 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan; (*vide* halaman 32-33 Putusan MK).

e. bahwa pendirian Mahkamah tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat samasekali terlepas dari pengawsan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi Advokat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> Pemerintah begitu pun lembaga peradilan tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat (*inherent power*) untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari Putusan MK ini adalah walaupun Advokat secara profesional tidak lagi diawasi masalah internalnya oleh Mahkamah Agung, namun dalam interaksi dengan penegak hukum lainnya, Advokat tetap tunduk pada kelembagaan hukum Peradilan Umum.

2. Pengaturan oleh Organisasi Profesi Advokat Indonesia

Organisasi advokat di Indonesia sudah eksis pada masa penjajahan Belanda walaupun jumlah advokat belum banyak pada waktu itu. Advokat hanya ada di kota- kota yang mempunyai *landraad* dan *raad van justitie*, dan mereka menggabungkan diri dalam organisasi yang disebut *Balie van advocaten*.[69]

Setelah Indonesia merdeka, pernah ada organisasi advokat yang disebut PAHI (Persatuan Ahli Hukum Indonesia?) dan ISHI (Ikatan Sardjana Hukum Indonesia). Tak banyak data yang dapat diperoleh mengenai kedua organisasi ini kecuali dalam tulisan Prof. Daniel S. Lev pernah disinggung bahwa PAHI bersedia menerima *rechtskundigen* yang hanya lulusan *Rechtsschool* sebagai anggota sedangkan ISHI membatasi anggotanya harus mempunyai gelar sarjana lengkap.[70]

---

[69] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7.
[70] Daniel S. Lev, *op.cit*., hlm. 51.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari sejarah yang dapat ditelusuri, organisasi advokat Indonesia yang pertama baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 1963 pada saat diadakan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia, Jakarta. Wadah tersebut diberi nama Persatuan Advokat Indonesia dan disingkat menjadi PAI.

Kemudian pada Musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964, baru diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia dengan singkatan baru "Peradin". Keanggotaan Peradin ini bersifat sukarela, para advokat bebas memilih untuk menjadi anggota ataupun tidak. Sebagai konsekuensinya muncullah berbagai wadah advokat lain dengan nama yang berbeda-beda. Melihat keadaaan ini, pemerintah mengusulkan agar dibentuk satu wadah tunggal saja. Akhirnya pada tanggal 10 November 1985 terbentuklah wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Namun Ikadin ini tidak bertahan lama karena tidak ditindak-lanjuti secara konsisten oleh pendirinya. Terjadilah perpecahan dalam tubuh Ikadin karena sekelompok pengurus tidak setuju dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin, dan puncaknya adalah insiden di Hotel Horison sekitar tahun 1990-an.

Sejak itu perpecahan antara para advokat kian parah sehingga pada tahun 2001, sudah muncul tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) organisasi advokat.[71]

[71] Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung.Ramadja Karya.hal 93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Banyak wadah advokat tetapi tidak ada Undang-Undang yang mengatur, itulah keadaan dunia profesi advokat Indonesia pada awal tahun 2000-an. Menyadari keadaan tersebut, 7 (tujuh) organisasi profesi advokat sepakat membentuk satu forum yang diberi nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada tanggal 11 Februari 2002. Dalam perjalanan pembentukan Undang-Undang Advokat, KKAI ini memberikan sumbangan yang sangat berharga dan berguna.[72]

Setelah UU Advokat diundangkan, ketujuh anggota KKAI ditambah "Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia" mengeluarkan "Deklarasi Pendirian" pada tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung-jawab berdasarkan UUD 1945 dan UU Advokat. Kemudian pada tanggal 8 September 2005 dengan Akta Pernyataan Pendirian yang dibuat dihadapan notaris, resmilah pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat menjadi PERADI dan dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Advocate Association*.

Namun kesatuan dan persatuan PERADI itu tidak berlangsung lama karena pada tanggal 20 Juli 2007, 4 (empat) dari delapan organisasi pendiri PERADI menarik diri dari keanggotaan PERADI dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan alasan bahwa PERADI bukan organisasi profesi, PERADI tidak melaksanakan konstitusi organisasi advokat, nama PERADI dan kepengurusannya baik Anggaran Dasar

[72] Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hal 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maupun Anggaran Rumah Tangga belum disahkan melalui kongres atau munas secara demokratis, PERADI bukan organisasi yang bersifat aspirasi karena menggunakan Anggaran Dasar yang dibuat notaris, sehingga aspirasinya hanya para pemegang saham yang tertera di dalam Akte Notaris.[73]

Konflik antara PERADI dan KAI tak akan dibahas lebih lanjut karena tidak relevan dengan pokok penelitian ini. Walaupun kehadiran KAI menjadi tantangan terhadap klaim PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat tetapi secara *de facto* sampai saat ini, PERADI merupakan satu-satunya wadah advokat tingkat nasional yang menjatuhkan sanksi kepada para advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.

a. Acara Peradilan Malpraktik Advokat.

Oleh karena PERADI merupakan organisasi profesi advokat Indonesia yang mengadili malpraktik advokat, maka acara peradilannya digunakan sebagai parameter untuk mengadakan perbandingan dalam penelitian ini.

Pedoman yang digunakan dalam mengadili seorang advokat diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007. Beberapa bagian penting dari Keputusan tersebut diringkas di bawah ini.

b. *Legal standing* Pengadu

[73] Dominggus Maurits Luitnan, *Tantangan dan Kemandirian Advokat*, (Jakarta: Bentara Komunika, 2010), hlm. 61-63.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KEAI menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh "pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan." Pasal ini dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah:

a) Klien.
b) Teman sejawat.
c) Pejabat Pemerintah.
d) Anggota Masyarakat.
e) Komisi Pengawas.
f) Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
g) Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada.
h) Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota
i) Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota. (Pasal 2 ayat 1).

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. (Pasal 2 ayat 2) Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan "Anggota Masyarakat" sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang "berkepentingan dan merasa dirugikan" oleh malpraktik seorang advokat boleh mengadu ke PERADI.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Susunan Majelis Kehormatan Daerah.

Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa perkara terdiri dari 5 (lima) orang anggota, diantaranya 3 (tiga) orang berasal dari unsur advokat yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah, 2 (dua) orang lagi dari unsur non-advokat, yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Yang menjadi Ketua Majelis harus dari unsur advokat.

d. Tahap Pengaduan

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pengaduan ditujukan kepada:

1. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau.
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau.
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Berkas pengaduan dibuat dalam 7(tujuh) rangkap, didaftar di bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Menurut informasi langsung dari PERADI Jakarta pada bulan April 2012, biaya pengaduan yang berlaku sekarang adalah Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kasus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan. Kalau berkas dinyatakan lengkap, maka dalam 7(tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah harus membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut. Majelis ini dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas pengaduan, apabila dianggap perlu maka Pengadu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pengaduannya.

Majelis menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu dengan melampirkan 1(satu) rangkap berkas pengaduan paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah menerima surat pemberitahuan, dalam waktu 21(dua puluh satu) hari kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis.

Kalau jangka waktu tersebut sudah lewat dan Teradu tidak memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja Majelis sudah harus mengirim surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14(empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan kedua ini diterima Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dengan demikian, Majelis dapat segera memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Tahap Persidangan

Kalau Teradu sudah memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima, Majelis sudah harus menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu. Panggilan ini harus diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 3(tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pengadu dapat mencabut pengaduannya sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Teradu.

Pengadu dan Teradu harus hadir secara pribadi di persidangan. Kalau Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bila terkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masing-masing pihak berhak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis akan memanggil untuk kedua kali. Apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur. Pada sidang kedua, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, saksi atau ahli, Majelis berwenang menetapkan keabsahan alat bukti di persidangan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada sidang ketiga, Majelis memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan Kesimpulan. Pada sidang ini, Pengadu maupun Teradu tidak perlu hadir secara pribadi. Baik sidang pertama, kedua maupun ketiga semua diadakan secara tertutup.

Pada sidang terakhir yang bersifat terbuka, pembacaan Putusan dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya diberitahu tentang hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut.

f. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Majelis diambil secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota Majelis yang kalah dalam pemungutan suara dapat membuat *dissenting opinion* yang dimuat di dalam Putusan.

Majelis dapat mengambil Putusan berupa:

1. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima.
2. Menolak pengaduan dari Pengadu.
3. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

Sanksi yang diberikan dalam Putusan dapat berupa:

1. Teguran lisan sebagai peringatan biasa.
2. Teguran tertulis sebagai peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
4. Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Putusan Dewan Kehormatan Daerah akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Nasional PERADI untuk dieksekusi kecuali Pengadu dan/atau Teradu mengajukan banding.

g. Pemeriksaan Tingkat Banding

Pengadu dan/atau Teradu yang tidak puas dengan Putusan tingkat pertama dapat mengajukan banding dalam waktu 21(dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal menerima salinan Putusan. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah yang akan meneruskan berkas tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14(empat belas) hari kerja.

Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding kepada Terbanding paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding. Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam 21(dua puluh satu) hari kerja sejak ia menerima Memori Banding.

Bila ia tidak menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu. Dewan Kehormatan Pusat harus membentuk Majelis Kehormatan Pusat dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Banding. Majelis terdiri dari 5(lima) orang anggota, 3(tiga) orang dari unsur Dewan Kehormatan, 2(dua) orang dari unsur non-advokat. Dalam hal tertentu Majelis dapat terdiri lebih dari 5(lima) orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Putusan Tingkat Banding

Majelis Kehormatan Pusat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

1. Menguatkan putusan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
3. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.

Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

i. Pemeriksaan Prorogasi

Apabila para pihak menghendaki maka pada sidang pertama mereka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan prorogasi sebelum Majelis Kehormatan Daerah memeriksa materi perkara. Apabila Majelis menyetujui permohonan tersebut, maka akan dibuatkan Penetapan Prorogasi dan berkasnya diserahkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah. Ketua Dewan lalu mengirim berkas tersebut kepada Ketua Dewan Kehormatan Pusat untuk ditindak-lanjuti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru.

1. Pelangaran Kode Etik Terkait Dengan Profesi Advokat

Di dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 31, mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana yang diatur oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dengan pemidanaan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, Pasal tersebut tidak menjerat kepada seorang advokat, tetapi menjerat kepada seseorang yang berpura-pura menjadi advokat dan melakukan pekerjaan yang sama seperti advokat.

Dalam kenyataanya, seorang advokat juga bisa melakukan sebuah tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.[74]

Tindak pidana yang bisa dilakukan seorang advokat ialah penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan surat, dan membuka rahasia, dalam profesi advokat delik-delik tersebut sangat mudah efeknya mempengaruhi seorang advokat sehingga mencederai kredibilitasnya sebagai seorang advokat.

---

[74] Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 372, yang mengatur:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratusrupiah."[75]

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini ialah:

a. Dengan sengaja memiliki.
b. Memiliki suatu barang.
c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Penipuan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 378, yang mengatur:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."[76]

---

[75] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 372.

[76] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 378.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut ialah:

a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan- perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pemerasan adalah delik yang diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1), yang mengatur:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut adalah:

a. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan kepada oranglain.
b. Memaksa untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.
c. Melakukan paksaan dengan kekrasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Membuka rahasia adalah delik yang diatur pada Pasal 322 KUHP ayat (1), yang mengatur:

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan riburupiah."[77]

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah:

a. Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.
b. Membuka rahasia baik sekarang maupun yang dahulu.

Pemalsuan surat ialah delik yang diatur pada Pasal 263ayat 1 KUHP, yang mengatur:

Barangsiapa membuat suart palsu atau memalsukansurat yang apat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud ntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."[78]

---

[77] M. Amin. 1975. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta pusat. Pradnya Paramita,Salam, Burhanuddin. Cetakan Pertama Tahun 1997. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.hal 98

[78] *Law Review, Fakultas Hukum Uttiven* Advokat sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran Advokat haruslah tidak menjadi *Bad Man.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah:

a. Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat.
b. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk bukti.
c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

2. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat sebagai Penasihat Hukum

Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi pertentangan.

Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA ini dinamakan "*encroaching*" atau "*trespassing*", secara paksa masuk dalam hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya "*obligation to refrain from deliberately stealing each other's clients*". Bagaimana dalam praktek nanti Dewan Kehormatan KEAI akan mendefinisikan "*stealing of clients*"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir.

Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA. Dalam asas ini tidak berlaku untuk mewawancarai saksi- saksi dari pihak lawan dalam berperkara (alinea 5 dan 6, Pasal 7 KEAI). Suatu etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum:

a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.
b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan.
c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat.

e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan.

f. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama.

g. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir.

h. Yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

3. Etika Pengawasan terhadap Advokat Melalui Pelaksanaan Kode Etik Advokat

Suatu etika pengawasan terhadap Advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di Cabang maupun di Pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tidak satu Pasal pun dalam Kode Etik Advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas Pasal-Pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat.

c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat ini dan atau-pun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya.

Hasil Wawancara Dengan Pengadu/Korban dari Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, Dr. Yudi Krismen S.H., MH.

"Pengadu sesama advokat Bapak Dr. Yudi Krismen S.H., MH menerangkan bahwa Pengadu telah mengadukan sebuah kasus pelanggaran kode etik profesi advokat pada tangal 07 Mei 2019 lalu. Dimana terdapat advokat yang merupakan anggota PERADI melakukan perbuatan pelanggaran berupa tidak menghormati teman sejawat kepada pengadu bersama dengan kliennya. Perbuatan yang dilakukan oleh teradu yang merupakan advokat tersebut kemudian diadukan kepada Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru. Dalam aduan yang pengadu/korban majelis Dewan Kehormatan Pekanbaru menimbang sebagai berikut.[79]

a. Telah membaca pengaduan pengadu dan jawaban teradu,

b. Telah mendengar keterangan pengadu serta teradu,

[79] Dr. Yudi Krismen S.H., MH Hasil Wawancara Dengan Pengadu/Korban dari Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi,

d. Telah membaca kesimpulan saksi."

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum berkewajiban turut membina Negara hukum Indonesia, bersama-sama dengan para sarjana hukum di bidang lain pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang diberikan dalam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya nasehat, pendapat, dan konsultasi hukum, jika dan sepanjang kemampuannya tidak cukup untuk pembelaan kepentingan dalam bidang hukum.

Adanya asas kemampuan/kesanggupan memikul imbalan karena pencari hukum/pencari keadilan itu harus memberikan imbalan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Bantuan dengan kata lain: tolongan, pertolongan ini diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang hukum karena keterlibatannya dalam masalah hukum. Karena kurang mengerti masalah hukum dan atau tidak mampu pengetahuannya tentang hukum dan miskin.

Namun apa yang di cita-citakan tersebut tidak lah berjalan dengan sebagaimana mestinya, dalam peraktek dilapangan selalu saja di temui advokat yang melangar sumpahnya sebagai advokat, yang mana sumpah itu harus di jaga dan di laksanakan sebagaimana mesrinya.pada kasus pelangaran kode etik advokat yang terjadi di Pekanbaru yang mana sesame teman sejawat saling tidak menghormati.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satu pelanggaran yang terjadi tampak dalam kasus: PUTUSAN PERKARA NOMOR: 005/PERADI/DKD/PEKANBARU/I/2020, di mana Muslim Amir, S. H., Advokat yang beralamat kantor di jalan Ahmad Yani 117 AB, Kota Pekanbaru di Putus Oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Pekanbaru telah melangar kode Etik Profesi Advokat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat dalam menerima perkara.

Di mana Majelis Dewan Kehormatan Pusat Peradi telah menyebutkan Amar Putusannya Kepada Muslim Amir, S. H. yang telah memperhatikan Pasal-pasal dari Kode Etik Advokat Indonesia dan Keputusan-keputusan Dewan kehormatan Pusat PERADI serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis kehormatan tingkat banding memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Teradu.
- Memperbaiki amar Putusan Dewan kehormatan Daerah Peradi Pekanbaru Nomor: 005/peradi/DKD/PEKANBARU/PUTUSAN/1/2020 tangal 22 Januari 2020, sehingga amar selenkapnya menjadi sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Menerima pengaduan Pengadu/Terbanding untuk Sebagian.
2. Menyatakan Teradu/Pembanding : MUSLIM AMIR, SH. NIA. 15.00486 terbukti melangar Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 a Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Menghukum Teradu/pembanding dengan sanksi "Teguran Keras".
4. Menghukum Teradu/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Hasil Wawancara penulis dengan Pengadu/Korban dari Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, Dr. Yudi Krismen S.H., MH.

Pengadu sesama advokat Bapak Dr. Yudi Krismen S.H., MH. menerangkan bahwa telah mengadukan advokat Muslim Amir, S. H.,. Salah satu yang dilakukan advokat Muslim Amir, S. H., adalah pelanggaran kode etik profesi advokat yang tejadi pada tahun 2019 yaitu terdapat advokat yang menjadi anggota PERADI telah melakukan perbuatan menunjukan sikap tidak saling menghormati diantara teman sejawat. Pelanggaran etika profesi advokat yang dilakukan adalah pelanggaran pasal 3 huruf (D),(F) dan (G) pasal 4 ayat (1), pasal 5 huruf (a) pasal 7 huruf (f) dan pasal 20 ayat (1) undang-undang advokat no 18 tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat.[80]

[80] Dr. Yudi Krismen S.H., MH Hasil Wawancara Dengan Pengadu/Korban dari Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dimana Dr. Yudi Krismen S.H., MH pada kesempatan wawancara di kantor Law Firm YK & PARTNE yang beralamat di jalan Kartama Gg. Santiana menjelaskan bahwa penegakan kode etik Provesi Advokat di Peradi Pekanbaru telah berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya. Dan Dr. Yudi Krismen S.H., MH berharap kedepanya Advokat-advokat yang ada di Indonesia khususnya Pekanbaru agar lebih baik lagi, dapat menghargai sesame rekan sejawat sesama Advokat penegak Hukum di Bumi Lancang Kuning ini.

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Malpraktek Advokat

Secara harfiah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan "*mal*" mempunyai arti (awalan) "salah; buruk" sedangkan "*practice*" "(praktek)" mempunyai arti "melaksanakan" atau "tindakan", sehingga malpraktek berarti "pelaksanaan atau tindakan yang salah". Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.[81]

Malpraktek merupakan tindakan dari Advokat dalam hubungan dengan pemberian jasa hukum kepada kliennya, dimana jasa hukum tersebut diberikannya dibawah standar operasional atau diberikan dengan melanggar kewajiban "*fiduciary*" dari Advokat atau dilakukan secara kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian, atau

[81] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm. 117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum karena antara Advokat dan kliennya mempunyai hubungan hukum tetang pemberian jasa hukum (*attorney-client relationship*), ataupun pihak Advokat melanggar kewajiban untuk memberikan loyalitas (*duty of loyality*) dan tugas untuk menjaga kerahasiaan. Sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap pemberian jasa hukum tersebut, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi klien yang dirugikan itu berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.[82]

Advokat merupakan salah satu profesi hukum di samping profesi hukum lainnya. Karena merupakan profesi, Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa yang disebut malpraktek.

Malpraktek dapat terjadi apabila Advokat melakukan pelanggaran terhadap etik profesinya, akan tetapi tidak setiap pelanggaran terhadap profesinya merupakan malpraktek.

Pengertian malpraktek dalam arti luas mencakup unsur-unsur:

a. Kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian dalam bentuk penipuan (termasuk "*onrechtmatige daad*").
b. Pelanggaran kewajiban "*fiduciary*".
c. Wanprestasi kontrak antara Advokat dan klien.[83]

[82] Dr. Munir Fuady, *Op. Cit*. Hlm. 76.
[83] Dr. Munir Fuady, *Ibid*. Hlm. 77.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Malpraktek Advokat karena kelalaian merupakan ketidakmampuan menangani kasus secara profesional tidak mengenal batasan kemampuan diri. Seharusnya dalam penanganannya konsultasi ataupun saran hukum klien malah dijerumuskan dalam masalah. Kelalaian karena kurang pengalaman, karena salah mengambil tindakan hukum, atau kurang layaknya tindakan hukum dengan standar pembelaan oleh seorang Advokat.

Berdasarkan pada pengertian malpraktek Advokat seperti tersebut diatas, maka suatu malpraktek Advokat baru terjadi jika memenuhi syarat- syarat yuridis sebagai berikut:

a. Adanya pemberian jasa hukum oleh Advokat (hak dan kewajiban).
b. Jasa hukum diberikan secara:
    1. Di bawah standar profesional yang berlaku.
    2. Di berikan dengan melanggar hukum kewajiban "*fiduciary*" dari Advokat, atau.
    3. Wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum, atau.
    4. Diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
c. Tindakan Advokat tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum (kesengajaan atau kelalaian).
d. Adanya kerugian terhadap kliennya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pemberian jasa hukum oleh Advokat tersebut.[84]

Malpraktek dapat disimpulkan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan.

Advokat seharusnya memiliki standar profesi yang merupakan norma- norma yang timbul dari sifat tindakan hukum yang digunakan advokat dan norma-norma yang timbul dari hak-hak klien (*informent consent*) serta norma-norma masyarakat yang sifatnya kasuistik. Perlu adanya pertimbangan nilai non-tindakan yang dapat berupa konsultasi ataupun saran hukum untuk menilai kelayakan Advokat sebelum menangani kasus klien.

Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Kemudian dalam profesi tertentu bisa diterjemahkan dengan istilah standar profesi.

---

[84] W. Poespoprodjo. Cetakan Pertama Tahun 1986. *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek.* Bandung. Remadja Karya CV.hal 127

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi profesi tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga bersifat psikis, biasanya ditampung dalam kode etik profesi.[85]

Advokat dalam memberikan pelayanan wajib untuk menginformasikan kepada klien secara lengkap dan komprehensif semaksimal mungkin tentang perkaranya, resiko, dan Advokat yang tidak menginformasikan secara jelas dan lengkap hal tersebut dapat diartikan sebagai malpraktek. Setiap profesi termasuk profesi Advokat berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut "*ethical malpractice*" dan dari sudut pandang hukum disebut "*yuridical malpractice*". Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi Advokat berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar.[86]

---

[85] Shidarta, *Op. Cit*. Hlm. 103-104.

[86] http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620080612AARd31x, Diakses Jumat, 16 April 2021 Pukul 09:25:27.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Etika dan hukum mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya "*ethical malpractice*" atau "*yuridical malpractice*" dengan sendirinya juga berbeda.

Yang jelas tidak setiap "*ethical malpractice*" merupakan "*yuridical malpractice*" akan tetapi semua bentuk "*yuridical malpractice*" pasti merupakan "*ethical malpractice*".

Untuk malpraktek hukum atau "*yuridical malpractice*" dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu:

a. *Criminal malpractice*"

   Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori "*criminal malpractice*" manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yaitu:

   1. Perbuatan tersebut ("*positive act"* maupun "*negative act"*) merupakan perbuatan tercela, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (e).
   2. Perbuatan dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yang berupa kesengajaan (*intensional*), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), kecerobohan (*reklessness*), atau kealpaan (*negligence*) bahkan penipuan (*bedrog*). Hal ini melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertanggung jawaban didepan hukum pada "*criminal malpractice*" adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung. Pelanggaran "*criminal malpractice*" seperti ini akan diperiksa dan diadili oleh dan berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat terlebih dahulu. Namun, tidak menghilangkan pertanggung jawabannya didepan hukum, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.

b. *Civil malpractice*

Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan "*civil malpractice*" apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga jasa yang dapat dikategorikan "*civil malpractice*" antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f)
2. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c)
4. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (c), (d), (e), dan (f)

Organisasi Advokat mengawasi dan menindak setiap Advokat yang melakukan pelanggaran "*civil malpractice*" ketentuan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

c. *Administrative malpractice*"

Tenaga jasa dikatakan telah melakukan "*administrative malpractice*" manakala orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan "*police power*", batas kewenangan serta kewajiban Advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka Advokat yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.[87]

Organisasi Advokat mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang ketentuan administratif Advokat, misalnya tentang persyaratan bagi Advokat untuk menjalankan profesinya. (Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, dan Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban Advokat.

[87] http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620080612AARd31x, Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Profesi Advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus menyadari adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk berusaha menjauhi segala larangan-larangan itu. Selain itu terdapat larangan- larangan lain yang harus dihindari seperti disebutkan dibawah ini:

a. Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya.
b. Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum, dimana tindakan seorang advokat seharusnya untuk membela dan melindungi klien dengan payung hukum.
c. Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 322 KUHP (1).
d. Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari Advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang ditanganinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat profesi Advokat.

f. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.

Advokat menjadi pejabat negara dibebaskan sementara waktu dari profesinya selaku Advokat selama memangku jabatan tersebut. Sebagai alternatif dapat dikatakan bahwa Advokat menjadi anggota lembaga tinggi negara dibebaskan sementara waktu dari profesinya selaku Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berupa :

a. Teguran.
b. Peringatan.
c. Peringatan keras.
d. Pemberhentian sementara dari profesinya untuk waktu tertentu.
e. Pemberhentian tetap dari profesinya.
f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman :

a. Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan.
c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melalukan pelanggaran kode etik profesi.

Advokat/Penasehat Hukum yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat Kerhormatan Profesi Advokat/Penasehat Hukum yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat, dapat dikenakan sanksi dengan hukuman pemberhentian selamanya.

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertenu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi Advokat/Penasehat Hukum baik di luar maupun di muka pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Kehakiman R.I. untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Setiap Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Majelis Dewan Kehormatan Pusat diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

B. Peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru.

1. Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat

Pengertian mengenai Organisasi Advokat terdapat pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (4): **"***Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini".*

Pengertian Dewan Kehormatan yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia yaitu: **"***Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanakan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi manusia bagi semua warga negara baik kehidupan berkenegaraan maupun bermasyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut peranan Advokat harus ditingkatkan yang membutuhkan satu kesatuan yang kuat dalam suatu organisasi untuk menegakkan keadilan hukum.

Undang-Undang Advokat tidak merinci apa yang dimaksud organisasi, tetapi menentukan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, dimana susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.[88]

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan hukum para Advokat diatur dalam *RO St.* 1847 No. 23 *jo.St.* 1848 No. 57 dan "*Rv*". Serta beberapa pasal peraturan perundangan lainnya. Pada masa itu masih langka sekali Advokat, mereka belum membentuk organisasi tetap para Advokat.

Para Advokat Indonesia secara aklamasi meresmikan berdirinya organisasi "Persatuan Advokat Indonesia" yang disingkat "PERADIN" sebagai satu-satunya wadah persatuan Advokat Indonesia, hal ini sebagai pengganti nama PAI (Persatuan Advokat Indonesia).

[88] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat (1), (2).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggung jawab PERADIN dalam pengisian Negara Hukum berpendirian:

a. Bahwa Negara Hukum yang demokratis harus memiliki hukum yang adil berperikemanusiaan dan pasti.
b. Bahwa hukum harus berdaulat dan berdiri di atas segala kekuasaan, maupun masyarakat.
c. Bahwa masyarakat harus bebas dari rasa takut untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat.
d. Bahwa kebebasan itu harus terjamin dan tercermin dalam kebebasan di dalam dan di luar peradilan serta profesi Advokat.
e. Bahwa harus ada jaminan hak-hak azasi untuk masyarakat dengan tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dan lemah.[89]

Wadah tunggal Advokat Indonesia terbentuk dengan nama Ikatan Advokat Indonesia yang disingkat IKADIN.[90] IKADIN merupakan wadah tunggal Organisasi Profesi Advokat Indonesia dalam menjalankan profesi Advokat, yang mempersatukan semua Advokat sebelum di undangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan profesi sejauh mungkin dihindari atau dicegah dari penyalahgunaan tujuan pemberian bantuan hukum itu sendiri ataupun pelanggaran terhadap Kode Etika Profesi Advokat.

---

[89] Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hal 98

[90] E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.hal108

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IKADIN terbentuk pula didaerah sebagai IKADIN Cabang yang mempunyai tugas pokok terutama konsolidasi Organisasi IKADIN, peningkatan keterampilan dan fasilitas praktek profesi Advokat Indonesia, membina kesadaran hukum masyarakat, serta menjalin hubungan kerjasama dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya.

Prinsipnya pemberian bantuan hukum oleh Advokat haruslah benar- benar ditangani secara profesional sesuai dengan kode etika dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan, untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara atau masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cuma- cuma, dikarenakan benar-benar tidak mampu.

Undang-Undang Advokat mendelegasikan kepada 8 (delapan) organisasi yang didirikan sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu "*untuk sementara* secara *bersama-sama menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat...*" sampai dengan terbentuknya Organisasi Advokat, yaitu untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak terbitnya Undang-Undang Advokat tanggal 5 April 2003 s/d tanggal 5 April 2004.[91]

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) 27 Juli 1990 di Jakarta, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 9 Mei 1987 di Surabaya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) 1988 di Jakarta, Himpunan Konsultan Hukum Pasar

[91] http://www.hukumonline.com. Diakses Jumat, 19 Maret 2021 Pukul 14:55 Pusat Data Hukumonline.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Modal (HKHPM) 4 April 1989 di Jakarta, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) 10 Desember 1997 di Jakarta, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Juli 1993 di Jakarta, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) 18 Februari 2003 di Semarang.

Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat Profesi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana mestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar kode etik Advokat.

Pengawasan adalah tindakan administratif yang bersifat preventif dan represif,[92] pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menurut Pasal 1 Ayat (3): *Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik.*

Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bertujuan Untuk menjaga agar para Advokat tidak mengabaikan keluhuran martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Sedangkan penindakan adalah penerapan sanksi administratif.[93]

---

[92] Sanusi, Muhammad, 1997, *Kode Etik Penasehat, Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya, Kompilasi Khusus Advokat*, Jakarta: AAI.hal 87

[93] Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Cutra Aditya Bakti.hal 91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 13 Ayat (1). Keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 13 Ayat (2). Pengawasan oleh masyarakat merupakan kesadaran hukum khususnya bagi klien pengguna jasa Advokat agar mendapat pelayanan dengan standar kualifikasi Advokat yang layak. Namun juga upaya masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan pelanggaran Advokat bila terjadi pelanggaran hak atas kewajiban Advokat kepadanya, apalagi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan Pasal 11 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

a. Klien.
b. Teman sejawat advokat.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota masyarakat.
e. Dewan Kehormatan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 10 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia. Pemeriksaan suatu pengaduan Pasal 10 Ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tingkat, yaitu:

a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah (tingkat pertama).
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat (tingkat terakhir).

2. Peran Peradi dalam menjaga, kehormatan profesi Advokat di Indonesia

Profesi apapun tidak dapat terhindar dari resiko penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi yang diucapkannya atau melanggar kode etiknya, maka perlu dilakukan tindakan baik bersifat administratif maupun yuridis.

Organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau Dewan Kehormatan Profesi. Badan itu selain menjaga aturan perundang- undangan dan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota. Mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya, yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam upaya penanggulangan malpraktek Advokat terdapat 2 (dua) macam aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yaitu mengenai pengawasan dan penindakan. Namun tindakan yang diambil oleh Organisasi Advokat tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi tidak mau menaatinya dan kemudian pindah ke Organisasi Advokat lain ataupun membuat Organisasi Advokat lain. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat.

Begitu pula dengan lemahnya pengaturan mengenai Organisasi Advokat selain karena belum solid antar anggota-anggotanya. Selain itu belum terwujudnya Komisi Pengawas yang dibentuk Organisasi Advokat.

Tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003:

a. *Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.*
b. *Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.*
c. *Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Organisasi Advokat lebih banyak menunggu pengaduan masyarakat daripada ikut aktif mengawasi anggota-anggotanya.[94]

Sistem pengawasan yang ada perlu ditingkatkan dengan merapikan pengawasan terhadap Advokat oleh Organisasi Advokat dengan adanya Dewan Kehormatan untuk menegakkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, menurut Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 Bab III Pengawasan:

Pasal 12

a. *Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.*
b. *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.*

Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 Bab II Penindakan Advokat:

Pasal 6:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

a. *Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.*
b. *Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.*

[94] Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hal 151

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. *Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.*

d. *Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.*

e. *Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.*

f. *Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.*

Pasal 6 huruf (a) dimaksudkan untuk membela kepentingan klien, setiap Advokat dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara klien sesuai dengan kesepakatan antara Advokat dan kliennya sesuai perjanjiannya.

Ketentuan dalam Pasal 6 huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Pasal 7 Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003:

a. *Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:*

   1. *Teguran lisan.*
   2. *Teguran tertulis.*
   3. *Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. *Pemberhentian tetap dari profesinya.*

b. *Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*

c. *Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.*

Pasal 8

a. *Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.*

b. *Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.*

Faktor yang menentukan efektivitas penegakan kode etik oleh Organisasi Advokat adalah "budaya" Advokat Indonesia dalam memandang dan menyikapi kode etik yang diberlakukan terhadapnya. "Budaya" solidaritas korps di sinyalir merupakan salah satu penghambat utama dari tidak berhasilnya kode etik ditegakkan secara efektif. Solidaritas ini lebih dikenal dengan "*spirit of the corps*" yang bermakna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpsnya. Karena banyaknya pengaduan masyarakat/klien tidak seimbang dengan penindakan yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Semangat membela kelompok, ada faktor perilaku Advokat yang dipandang lebih menonjol ketika Advokat menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman sejawatnya atau oleh aparat penegak hukum lainnya, yakni budaya skeptis. Kecenderungan untuk berperilaku tidak acuh tampak jelas. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang sudah sangat "*corrupt*" dan rasa segan untuk bertindak "*heroic*" secara individual dalam konferensi "*International Bar Association"* (IBA) "*Standards for the Independence of the Legal Profession, Declaration of the World Conference on the Independence of Justice* yang mengatakan :

a corrupt judiciary cannot exist without the active collaboration of some lawyers and the supine indifference of other lawyers to the phenomenon of judicial corruption.[95]

Dilihat dari sudut pandang lain, substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para Advokat anggotanya.

---

[95] http://www.hukumonline.com. Maryono, Didik, 29 Mei 2021 Pukul 10:57, *Kritisi Advokat (Suatu Analisis berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etika Advokat)*, Diakses Jumat, 19 September 2021 Pukul 14:55: Pusat Data Hukumonline

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. Menurut penulis selama ini beberapa faktor yang menyebabkan kondisi rendahnya kualitas pengemban profesi Advokat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
b. Organisasi profesi dan dewan kehormatan tidak menyediakan sarana dan prosedur yang mudah oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, dan kurang tanggap menerima keluhan masyarakat.
c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi hukum akibat buruknya sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri.
d. Belum terbentuknya budaya dan kesadaran dari para pengemban profesi hukum itu sendiri untuk menjaga martabat luhur dan profesinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Belum adanya kesadaran etis dan moral antara para pengemban profesi bahwa menaati keputusan dewan kehormatan profesi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga martabat profesi.

Dengan demikian muatan dalam kode etik Advokat yang ada sekarang ini memang tidak menyediakan secara memadai kebutuhan akan nilai-nilai profesi yang mampu memantapkan fungsi dan peran Advokat di dalam sistem hukum dan interaksinya dengan masyarakat.

Tekanan suatu komunitas yang justru seringkali bergantung pada rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Akibatnya, para Advokat cenderung untuk berpraktek di luar pengadilan dan/atau membentuk kelompoknya sendiri.

Dalam sistem pengawasan yang ada terdapat adanya kerancuan pengawasan terhadap Advokat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan Organisasi Advokat.

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyatakan "Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Sementara, Organisasi Advokat yang dimaksud adalah satu- satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang Advokat.

Ada harapan permohonan yang diajukan akan membuka mata semua pihak bukan saja atas kerancuan kewenangan pengawasan Advokat, tetapi juga memastikan siapakah sebenarnya yang memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan itu. Mahkamah Agung tetap berwenang mengawasi Advokat sepanjang menyangkut tindak pidana seperti "*contempt of court*", tetapi pengawasan karena pelanggaran kode etik, Organisasi Advokat tetap berperan.

Masalah batas kewenangan pengawasan antar kedua lembaga belum jelas.[96] Mahkamah Agung tidak akan berwenang menindak Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat sesuai Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (4) hanya terbatas pada alasan-alasan yaitu:

a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien.
b. Berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak terhormat kepada hukum undang-undang, pengadilan atau pejabatnya.
c. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya (melanggar sumpah jabatan dan melanggar kode etik profesi).
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.[97]

Masyarakat pun dapat melakukan pengawasan dengan adanya tata cara pengaduan sesuai dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Pasal 12

[96] Hartanto, SH, M.Hum, dan Murofiqudin, SH, M.Hum. undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Pelengkapnya, Muhammadiyah University Press 2001, Surakarta.hal 112

[97] E. Sumaryono. Cetakan Kelima tahun 2002. *Etika dan Hukum*. Yogyakarta. PENERBIT KANISISUS

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. *Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.*
b. *Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.*
c. *Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.*
d. *Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.*

Setelah adanya pengaduan dari masyarakat kemudian sesuai Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan PerkaraPengaduan Dewan Kehormatan Pusat Dan Daerah diproses dan ditindak oleh Dewan Kehormatan sesuai Keputusan Dewan Kehormatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Tindakan pemeriksaan aduan dari masyarakat tersebut kemudian disebut pengaduan adalah laporan tertulis atas Advokat yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik Advokat (sesuai dengan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia).

Dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dengan susunan dan kedudukan sesuai dengan Keputusan Dewan Kehormatan PusatPerhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, pada pemeriksaan tingkat pertama sesuai dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Pasal 13

a. *Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.*
b. *Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

c. *Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan KehormatanCabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.*

d. *Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.*

e. *Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.*

f. *Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. *Pengadu dan yang teradu.*

1. *Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.*
2. *Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.*

h. *Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:*

1. *Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku.*
2. *Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.*
3. *Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.*

i. *Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. *Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.*
2. *Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.*
3. *Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.*

j. *Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.*

Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah:

Pasal 14

a. *Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.*
b. *Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

c. *Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.*

d. *Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.*

e. *Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.*

Cara pengambilan keputusan oleh DewanKehormatan Cabang/Daerah:

Pasal 15

a. *Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:*

   1. *Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima.*
   2. *Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.*
   3. *Menolak pengaduan dari pengadu.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. *Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.*

c. *Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.*

d. *Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.*

e. *Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.*

Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat mengandung Unsur pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 Ayat (6).

Sebagai kelanjutan dari penindakan terhadap Advokat yang dianggap melakukan malpraktek Advokat, apabila ia diberi kesempatan untuk memperbaikinya tidak dimanfaatkan, maka tindakan akhir adalah pemberhentian praktek sebagai Advokat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan secara tetap karena alasan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

a. *Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan.*
    1. *permohonan sendiri.*
    2. *dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau*
    3. *berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.*
b. *Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.*

Dalam hal Advokat melakukan tindakan pidana yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri menyampaikan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 10 huruf b yakni mengenai pemberhentian Advokat, karena melakukan tindakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

Salinan keputusan pemberhentian disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Menteri dimaksudkan agar instansi-instansi tersebut mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi berpraktek karena telah diberhentikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kendala dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru

1. Kendala dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat masih belum dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan baik Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Kode Etik Profesi Advokat tanggal 23 Mei 2002. Hal tersebut dikarenakan selain terdapat permasalahan intern di PERADI sendiri juga terdapat hambatan – hambatan yang masih dirasakan baik oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru maupun dari Pengadu. Apabila hambatan – hambatan tersebut masih dibiarkan maka akan berdampak buruk dan menjadi penghalang dari penegakan kode etik profesi advokat.[98]

Kendala tersebut diantaranya adalah mengenai sarana dan/atau Fasilitas yang kurang. Pada dasarnya para Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI bersifat bebas yaitu tidak memiliki kantor tetap dalam peran sebagai Dewan Kehormatan Daerah PERADI serta tidak mendapatkan bayaran selama penugasan dalam menangani setiap aduan. Sehingga hal ini tergantung dan didasarkan kepada hati nurani dan kepedulian dari masing – masing individu dalam Dewan Kehormatan Daerah Peradi pekanbaru.[99]

---

[98] Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta, Granit.hal 17

[99] Ashshofa, Burhan. Cetakan Keempat Tahun 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.hal 28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kendala yang kedua adalah waktu. Selama proses penanganan perkara aduan pelanggaran kode etik profesi advokat para Majelis Dewan Kehormatan Daerah memilki kendala saat rentan waktu pemberitahuan sidang dengan hari H pelaksanaan sidang yang terlalu mendadak. Selain itu juga terdapat hambatan berupa terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan dimana Sampai saat ini setelah adanya Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan telah dibentuknya Dewan Kehormatan PERADI keberadaan Dewan Kehormatan serta tidak mengetahui mengenai arti dari keberadaan Dewan Kehormatan. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan saat mengetahui pelanggaran kode etik profesi advokat.[100]

Kendala lainnya adalah kerjasama antara pihak PERADI dengan Mahkamah Agung dimana seperti yang telah dijabarkan didalam pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan putusan dilakukan antara Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Mahkamah Agung. Sejak pertama kali didirikan Dewan Kehormatan PERADI pada tahun 2010 sampai dengan akhir 2020 belum dapat dilakukan eksekusi putusan.[101]

Hal ini dikarenakan belum adanya kordinasi antara PERADI dengan Mahkamah Agung meskipun telah terdapat MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara keduanya sejak didirikan Dewan Kehormatan PERADI.

---

[100] Fajar, Mukti dan Yulianto Achnmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

[101] Rosdalina, **Jurnal Politik Profetik** *Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015 (Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama)*, Institut Agama Islam Negeri Manado

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendala lainnya adalah pengaruh biaya yang ditetapkan saat melakukan pengaduan kepada Kesekertariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru, Selain itu juga terdapat syarat – syarat dan ketentuan lain yang dipikul pihak pengadu. Kendala-kendala tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, faktor dari putusan Dewan Kehormatan yang tidak dapat dieksekusi dengan cepat menyebabkan advokat terus melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. Hal yang sangat menyayangkan adalah apabila saat kasus telah selesai dan putusan telah dicapai kata incraht tidak dilakukan pelaksanaan putusan tersebut dengan tanggap dan cepat.[102]

Tidak dapat dilaksanakan putusan tersebut dikarenakan Dewan Pimpinan Nasional PERADI belum dapat mengirimkan permohonan pelaksanaan putusan incraht dengan cepat kepada Mahkamah Agung karena suatu alasan intern didalam PERADI. Selain itu, faktor– faktor lain seperti menumpuknya aduan pelanggaran yang terjadi terhambat oleh masa transisi atau pergantian kepengurusan dari Dewan Kehormatan Daerah PERADI. Padahal MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang merupakan sebuah perjanjian dan nota kesepahaman antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Mahkamah Agung (MA) sudah ada sejak dibentuknya Dewan Kehormatan PERADI. Akan tetapi, dikarenakan suatu hal didalam PERADI yang

[102] Usman Pelly. Jurnal. 1994. *Teori – teori Sosial Budaya*. Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal 2 Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.hal 19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membuat MOU antara kedua belah pihak lembaga tersebut baru dapat dilaksanakan pada saat ini yaitu pada rentang waktu antara akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017.[103]

Meskipun demikian, terdapat berita menggembirakan bahwa setelah adanya desakan dari Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jakarta dan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru yang merupakan wilayah dengan perkara pelanggaran kode etik profesi advokat bisa terbilang banyak sehingga peraturan pelaksanaan putusan incraht PERADI dibahas ulang dan membuat putusan incraht tersebut telah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan oleh MA yang kemudian di tulis disebuah surat kabar yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Putusan pemberhentian tetap dari 6 Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode etik profesi advokat.[104]

2. Upaya A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Hendri Zanita S.H., MH., beliau mengatakan:

yang membuat gaduh suasana profesi advokat ini ada dua permasalahan yang pertama ialah banyaknya organisasi advokat dan kedua sulitnya untuk mengakomodir advokat-advokat yang nakal".[105]

---

[103] Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.hal 74

[104] Shidarta. Cetakan kedua tahun 2009. *moralitas profesi hukum*. Bandung. Refika Aditama.hal 91

[105] Hendri Zanita S.H., MH., Advokat Peradi Pekanbaru, wawancara oleh penulis, 24 April 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Banyaknya organisasi advokat dikarenakan adanya aturan Mahkamah Agung, semua profesi advokat ketika dia mempunyai badan hukum lengkap dengan semua persyaratan dan lain-lain sebagainya maka mereka sudah bisa merekrut anggota sendiri dan di akui oleh Pengadilan.

Lebih lanjut Ibuk Hendri Zanita S.H., MH., beliau mengatakan:

"Dengan banyaknya profesi advokat maka sangatsulit untuk mengakomudir advokat-advokat yang nakal misalnya saya dari advokat peradin ketika saya melakukan tindakan kejahatan atau diduga melakukan tindak pidana ancaman 5 tahun supaya saya tidak terjerat hukuman kalau misalnya saya mau di sidang kode etik saya kan tinggal pindah ke organisasi lain ketika saya pindah ke peradi maka saya kan tidak bisa sidang kode etik pelanggaran itu, hal ini lah yang sulit di di hadapi oleh profesi advokat dalam hal melakukan pengawasan terhadap anggota- anggotanya".[106]

Hal ini merupakan cela yang bisa saja dimanfaatkan oleh para advokat yang melakukan pelanggaran. Beriring dengan pendapatnya yang mengungkapkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap advokat-advokat nakal, Ibuk Hendri Zanita S.H., MH. juga mengeluarkan pendapatnya yang berisi saran untuk menangani hal tersebut bahwa:

"Makanya saran kita beberapa teman kita atau rekan sejawat ialah sebaiknya organisasi dari profesi Peradi, Peradin, KAI, AAI, harus masing-masing ada perwakilan, perwakilan itulah yang mencoba membuat lembaga pengawas kalau di kepolisian ada namanya kompolnas, yang di kejaksaan

[106] Hendri Zanita S.H., MH., Advokat Peradi Pekanbaru, wawancara oleh penulis, 24 April 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ada yang namanya komisi kejaksaan, untuk hakim ada namanya komisi yudisial, maka harapan kita ialah perwakilan-perwakilan setiap profesi advokat itu membentuk namanya lembaga pengawas untuk menyidangkan dalam bentuk sidang kode etik advokat-advokat yang nakal itu untuk mengantisipasi supaya jangan terlalu banyak masalah di lingkungan masyarakat kita".[107]

Dengan demikian, ada pun yang menjadi upaya AAI untuk menertibkan anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran kode etik ialah menyelenggarakan seminar untuk nmensosialisasikan kode etik advokat indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan pelanggaran kode etik, dan dewan kehormatan harus berani menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggar kode etik sehingga bisa ,menjadi efek jera bagi advokat lainnya.

[107] Hendri Zanita S.H., MH., Advokat Peradi Pekanbaru, wawancara oleh penulis, 24 April 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia di DPD Peradi Pekanbaru dalam tahap sebelum persidangan dan saat dilakukan persidangan yang selama ini dilakukan dan dijalankan oleh PERADI berdasar Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia kepada advokat pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik didalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Kode Etik Profesi Advokat Tanggal 23 Mei 2002. Pelaksanaan putusan incraht yang tidak dilakukan dengan segera menjadi salah 1 faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat berjalan dengan lancar yang dimana menyebabkan masih banyak terjadi perbuatan pelanggaran kode etik profesi advokat.
2. Peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat dalam hal menangani pelangaran kode etik advokat terhadap sesama kawan sejawat adalah dengan cara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membentuk suatu dewan kehormatan advokat yang anggotanya terdiri dari masing-masing perwakilan organisasi advokat dan menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan kode etik advokat indonesia agar masyarakat umum tahu dan advokat-advokat yang ada di Indonesia lebih paham bagaimana menghormati, menghargai rekan sejawat, dan dewan kehormatan harus berani menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggar kode etik sehingga bisa ,menjadi efek jera bagi advokat yang berani berbuaat pelangaran kose etik Advokat.

3. Penyebab lain dari tidak berjalan dengan lancarnya penegakan hukum tersebut dikarenakan terdapat faktor – faktor penghambat didalam proses penegakan hukum. efektivitas hukum terdiri dari berbagai faktor penghambat, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri yaitu, Undang – undang, faktor dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan/atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sedangkan Faktor – faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Sarana dan/atau Fasilitas yang kurang, Waktu, Terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, Kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung, Biaya perkara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Aadapun saran-saran yang dapat di ajukan dalam rangka penelitian ini sebagaiberikut:

1. Koordinasi hubungan dan komunikasi antara sesama lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah PERADI selaku organisasi advokat dan Mahkamah Agung harus dipelihara dengan baik agar pelaksanaan putusan incraht Majelis Dewan Kehormatan PERADI mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi advokat dapat terus dilaksanakan secara efektiv dan cepat. Dewan Kehormatan Daerah PERADI sendiri sebisanya juga dapat diberikan kewenangan untuk melaporkan putusan incraht secara langsung kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hambatan – hambatan dalam koordinasi antara Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Mahkamah Agung juga untuk mengefektivitaskan waktu pelaksanaan putusan. Serta perbaikan moral dari setiap advokat harus selalu dilakukan baik dari organisasi advokat sendiri maupun dari diri advokat sendiri.
2. Keberanian dewan kehormatan dalam menjatuhkan sanksi juga merupakan faktor yang membantu agar banyak advokat mematuhi kode etik advokat Indonesia, selama ini tidak pernah ada penjatuhan sanksi yang berat dan berdampak signifikan dalam penegakan kode etik ini juga menjadi penghambat agar kode etik dihormati.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta, Granit.

Ashshofa, Burhan. Cetakan Keempat Tahun 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama, (Jakarta: Jala Permata, 2008).

Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design,* dalam T. Mulya Lubis, *Reformasi,* Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988.

E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia* :*Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

hTe American Heritage Dictionary of The English Language , 3rd edition. (Boston: Houghton Mifflin, 2010).

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999).

Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. (Jakarta: Djambatan, 2002).

Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, cetakan pertama, (Jakarta: YLBHI, 1989).

Magnis Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2011).

Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2001.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2015

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

———— , *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat.* Cet. I: Bandung: Yrama Widya, 2016.

Sarmadi, H. A. Sukris. Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini. Jakarta: Bina Cipta, 2009.

Supriadi, dalam *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2008.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan*, cetakan kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Soekanto, Soejono, 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Taufiqurrahman Ruki, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Winarta, Frans Hendra, S.H. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016.

B. Jurnal/Artikel

B, Simanjuntak dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.

Daniel S. Lev, "Origins of the Indonesian Advocacy," *Hukum dan Keadilan 3*. (September – Oktober 2000).

Dominggus Maurits Luitnan, *Tantangan dan Kemandirian Advokat*, (Jakarta: Bentara Komunika, 2010).

Hartanto, SH, M.Hum, dan Murofiqudin, SH, M.Hum. undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Pelengkapnya, Muhammadiyah University Press 2001, Surakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jimly Asshiddiqie, *Papper. Disampaikan dalam* Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.*

K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin – Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1969).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Tahun 1991, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Kamus Hukum, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court, Suatu Proses di Dewan Kehormatan Pusat*, cetakan kedua, edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002).

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

Usman Pelly. Jurnal. 1994. *Teori – teori Sosial Budaya*. Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal 2 Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Rosdalina, Jurnal Politik Profetik *Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015 (Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama)*, Institut Agama Islam Negeri Manado.

Tempo, 22 Januari 1994, dalam BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.

Tim Redaksi New Justissica, 2006, *Jurnal Hukum*, Vol.1, Surakarta: New Justissica.

Sanusi, Muhammad, 1997, *Kode Etik Penasehat, Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya, Kompilasi Khusus Advokat*, Jakarta: AAI.

C. Undang- Undang :

PUTUSAN PERKARA NOMOR: 005 / PERADI / DKD / PEKANBARU / I / 2020.

Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 372.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 378.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat (1), (2).

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta, tanggal 16 April 1999.

D. Websait.Dll

http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30.

http://dictionary.reference.com/browse/advocate diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30

http://en.wikipedia.org/wiki/Advocate diunduh pada 30 Maret 2021 pukul 14.30.

http://blackslawdictionary.org diunduh pada 2 April 2021

http://www.scribd.com/doc/73639020/an-Advokat-Dalam-Menerima-Honorarium-Dari-Klien-Terdakwa-. diakses pukul 22.03 WIB 05 Maret 2021.

http://ksmfhumts.wordpress.com/2021/03/31/peranan-advokat dalam-penegakan hukum-2/diakses pukul 21.30 WIB 05 Maret 202.

http://lawyersinbali.wordpress.com/2021/03/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/diakses pukul 00.54 WIB 05 Maret 2021.

www.ksmfhumts.wordpress.com tentang Advokat pasal 28 ayat (1), 05 Maret 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :